

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dilingkungan Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Pencapaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disisi lain, LAKIP ini dapat menjadi cermin pembanding bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2020, sekaligus sebagai alat pemacu untuk meningkatkan kinerja di tahun berikutnya agar lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun pelaksanaannya.

Padang, Januari 2021

Kepala Dinas



Ir. Fathol Bari, M.Sc.Eng

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19640515 199003 1 010

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020. Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran, serta Visi dan Misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021. Visi tersebut yakni sebagai **"Mewujudkan Infrastruktur yang handal, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan"**, yang merupakan bagian dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD-P sebesar **Rp. 344.573.489.633,-** dengan Realisasi sebesar **Rp. 325.661.322.371,- (94.51%)** yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan 16 (enam belas) program, 194 (seratus sembilan puluh empat) kegiatan di APBD-P. Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun 2020 sebesar **Rp. 747.375.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 556.027.000,- (74.40 %)**.

Tabel Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Restribusi	Anggaran	Realisasi	%
1.	Laboratorium	227.375.000,00	312.445.000,00	137,41
2.	Alat-Alat Berat	520.000.000,00	243.582.000,00	46,84
	Jumlah	747.375.000,00	556.027.000,00	74,40

Dana APBD SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 sebesar :

**Tabel Pagu Dana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Sumatera Barat**

No.	Uraian	Rencana	Realisasi	Sisa	%
1.	Belanja Tidak Langsung	30.302.707.432,00	29.642.109.299,00	660.598.133,00	97,82
2.	Belanja Langsung	344.573.489.633,00	325.661.322.371,66	18.912.167.262,00	94,51
	Jumlah	374.876.197.065,00	355.303.431.670,66	19.572.765.395,00	94,78

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020 terdapat 16 (enam belas) program terdiri dari 11 (sebelas) program strategis dan 5 program pendukung. *Out put* dan *out come* dari program-program strategis tersebut mempunyai korelasi/keterkaitan langsung dengan indikator kinerja pemerintah Provinsi.

Dari hasil *evaluasi capaian kinerja keuangan* terhadap 16 (enam belas) program , diketahui bahwa terdapat 14 (empat belas) program yang berkinerja sangat baik , 1 (satu) program yang berkinerja cukup dan 1 (satu) program batal dilaksanakan.

Rekapitulasi Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PUPR Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	<i>Tim evaluator</i>
2	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	74%	73,92 %
3	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Persentase cakupan air minum	80%	80.04%
		Persentase cakupan sanitasi	79%	81.68%
4	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	84%	84%

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Lampiran	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Organisasi	1
1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi	2
1.1.2 Tugas Pokok Organisasi	2
1.1.3 Struktur Organisasi	18
1.1.4 Sumber Daya Manusia	18
1.2 Aspek Strategis Organisasi.....	23
1.3 Permasalahan Utama (<i>Strategic Issues</i>) yang dihadapi Organisasi.....	24
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA.....	26
2.1 Peran Strategis	26
2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	33
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	38
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	38
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	38
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	39
3.3.1 Capaian Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja	39
3.3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	40
3.3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja& Capaian dengan Tahun Lalu.....	40
3.3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun 2020 terhadap Renstra	40
3.3.2 Capaian Kinerja Indikator Persentase Jalan Mantap	41
3.3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	48
3.3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja& Capaian dengan Tahun Lalu.....	48
3.3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun 2020 terhadap Renstra	48
3.3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Standar Nasional	49
3.3.2.5 Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Jalan Mantap.....	49
3.3.2.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)	51
3.3.2.7 Realisasi Anggaran	52
3.3.3 Capaian Kinerja Indikator Persentase Cakupan Air Minum	61
3.3.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	65
3.3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja& Capaian dengan Tahun Lalu.....	65

3.3.3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun 2020 terhadap Renstra	65
3.3.3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Standar Nasional	66
3.3.3.5	Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Cakupan Air Minum.....	66
3.3.3.6	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang).....	67
3.3.3.7	Realisasi Anggaran	68
3.3.4	Capaian Kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	70
3.3.4.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	70
3.3.4.2	Perbandingan Realisasi Kinerja& Capaian dengan Tahun Lalu.....	72
3.3.4.3	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun 2020 terhadap Renstra	72
3.3.4.4	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Standar Nasional	72
3.3.4.5	Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Rumah Tangga Bersanitasi.....	73
3.3.4.6	Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Rumah Tangga Bersanitasi.....	73
3.3.4.7	Realisasi Anggaran	74
3.3.5	Capaian Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	76
3.3.5.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	76
3.3.5.2	Perbandingan Realisasi Kinerja& Capaian dengan Tahun Lalu.....	79
3.3.5.3	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun 2020 terhadap Renstra	80
3.3.5.4	Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	80
3.3.5.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)	81
3.3.5.6	Realisasi Anggaran	81
BAB 4.	PENUTUP	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas PUPR tahun 2020	20
Gambar 1.2 Proporsi Pegawai Dinas PUPR berdasarkan kelamin Tahun 2020	21
Gambar 1.3 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020	21
Gambar 1.4 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Golongan Tahun 2020	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Jenis Kelamin	19
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 berdasarkan tingkat pendidikan	21
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan pangkat/golongan	22
Tabel 2.1	Peran Strategis Dinas PUPR dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	27
Tabel 2.2	Tabel Penyesuaian Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.....	30
Tabel 2.3	Indikator Kinerja & Target Capaian Dinas PUPR sesuai RPJMD 2016-2021...	32
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020.....	34
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Awal Kepala Dinas PUPR tahun 2020.....	34
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas PUPR tahun 2020	35
Tabel 3.1	Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II.....	39
Tabel 3.2	Klasifikasi Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis Dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020.....	39
Tabel 3.3	Pengukuran Target Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	40
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja.....	40
Tabel 3.5	Perbandingan Realisasi Kinerja&Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2018,2019&2020	40
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2020 Terhadap Renstra.....	41
Tabel 3.7	Pengukuran Target Kinerja Kemantapan Jalan Dinas PUPR.....	41
Tabel 3.8	Pengukuran Target Kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar Jumlah Ruas Jalan yang terkoneksi dengan Kondisi Jalan Mantap.....	42
Tabel 3.9	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat Per Ruas Tahun 2020	43
Tabel 3.10	Capaian Kinerja Indikator Persentase Jalan Mantap	48
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja&Capaian Jalan Mantap tahun 2018,2019&2020	48
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2020 Terhadap Renstra.....	49
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Persentase Jalan Mantap Dengan standar Nasional	49
Tabel 3.14	Program / Kegiatan Pendukung Capaian Persentase Kemantapan Jalan Provinsi	52
Tabel 3.15	Target dan Capaian Indikator Persentase Cakupan	61
Tabel 3.16	Rekapitulasi Data Cakupan Akses Penyediaan Layanan Air Minum dan Daerah Rawan Air Per Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat sampai tahun 2020	62
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Indikator Persentase Cakupan Air Minum di Sumatera Barat	65
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi Kinerja&Capaian Cakupan Layanan Air Minum tahun 2018,2019&2020	65
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2020 Terhadap Renstra.....	66

Tabel 3.20	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja	66
Tabel 3.21	Program/Kegiatan Pendukung Capaian Cakupan Air Minum	69
Tabel 3.22	Target dan Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga.....	70
Tabel 3.23	Laporan Kemajuan Akses Jamban Provinsi Sumatera Barat s/d Desember 2020	71
Tabel 3.24	Realisasi Kinerja & Capaian Persentase Sanitasi tahun 2018, 2019 & 2020	72
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2020 Terhadap Renstra.....	72
Tabel 3.26	Perbandingan antara Realisasi dengan Standar Nasional (dalam kurun RPJMN 2015-2020)	73
Tabel 3.27	Program/Kegiatan Pendukung Capaian Cakupan Sanitasi	75
Tabel 3.28	Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang	76
Tabel 3.29	Capaian Kinerja Indikator kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang	79
Tabel 3.30	Perbandingan Realisasi Kinerja&Capaian kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang tahun 2018,2019&2020	79
Tabel 3.31	Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2020 Terhadap Renstra.....	80
Tabel 3.32	Program/Kegiatan Pendukung Capaian Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	82
Tabel 3.33	Penilaian Kinerja Program/Kegiatan Dinas PUPR Tahun 2020	83

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Perjanjian Kinerja Eselon II (awal)
- Lampiran II : Perjanjian Kinerja Eselon II (perubahan)
- Lampiran III : Perjanjian Kinerja Eselon III
- Lampiran IV : Perjanjian Kinerja Eselon IV
- Lampiran V : Perjanjian Kinerja staf (jilid tersendiri)
- Lampiran VI : Indikator Kinerja Utama(IKU) Eselon II
- Lampiran VII : Rencana Kinerja Tahunan (2020)
- Lampiran VIII : Rencana Aksi Eselon II
- Lampiran IX : Rencana Aksi Eselon III dan IV
- Lampiran X : Realisasi Rencana Aksi Eselon II (Triwulan I-IV)
- Lampiran XI : Realisasi Rencana Aksi Eselon III & IV
- Lampiran XII : Rekapitulasi Realisasi Fisik & Keuangan Kegiatan Tahun 2020
- Lampiran XIII : Cascading Dinas PUPR
- Lampiran XIV : Data dukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemantapan Jalan
- Lampiran XV : Data Dukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan Air Minum
- Lampiran XVI : Data Dukung Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan Sanitasi
- Lampiran XVII : Revisi Renstra (jilid tersendiri)
- Lampiran XVIII : SK Lakip tahun 2020

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah berupaya mewujudkan tujuan nasional dan daerah. Dalam tataran nasional, pemerintah memiliki visi yaitu terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sementara sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat, pemerintah memiliki visi yaitu Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PUPR dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas PUPR sendiri memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dilingkungan Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Sebagai perwujudannya perlu disampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah yang ada di suatu wilayah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016. Laporan ini memuat analisis kinerja dan keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera

Barat yaitu sebanyak 16 program dan 194 kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2020.

Tata cara penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat awalnya merupakan bagian dari Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Prasjal Tarkim). Setelah Perda Nomor 8 tahun 2016 diterbitkan maka Dinas Prasjal Tarkim dipecah menjadi 2 (dua) dinas yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan). Berdasarkan Perda tersebut

1.1.2 Tugas Pokok Organisasi

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016, Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 104 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) diketahui bahwa Dinas PUPR merupakan dinas daerah tipe B yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
5. Pelaksanaan tugas di bidang Keciptakarya, Pelaksanaan Jalan serta bidang Penataan Ruang.

6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keciaptakaryaan, Pelaksanaan Jalanserta Bidang Penataan Ruang.
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki susunan organisasi dinas dengan fungsinya masing-masing.

1. Kepala Dinas

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan di Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- e. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis di Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Sekretaris

Sekretaris memimpin bagian sekretariat. Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Dinas;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Uraian tugas pokok dan fungsi sekretariat meliputi :

- a. menyiapkan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;

- c. menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- f. menyiapkan bahan kerja sama dan kehumasan;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
- i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. Sub Bagian Keuangan dan Program

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan dan Program.

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang dan Program;
- b. pelaksanaan dan penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan bidang keuangan dan program di lingkungan Dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Keuangan dan Program meliputi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang Keuangan dan Program;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi ;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang ;
- h. menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program;
- j. menyelenggarakan koodinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Kinerja, laporan keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan;

- k. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan, Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Bidang Bina Marga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Marga meliputi :

- a. menyelenggarakan program kerja dan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan teknis dan leger jalan, pembangunan jalan dan jembatan, serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan, Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. menyelenggaraan pembinaan pengelolaan administrasi perencanaan teknis dan leger jalan, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis operasional, bantuan teknis perencanaan, rekomendasi pemberian izin utilitas pada badan jalan dan manfaat jalan serta jembatan;
- f. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan/pengendalian kegiatan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi;
- g. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi mengenai perencanaan teknis dan leger jalan, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;

- h. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan ke-Bina Marga-an di kabupaten/kota;
- i. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi Bidang ke-Bina Marga-an.
- j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan perencanaan teknis dan leger, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.1. Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan

Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan.

Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan teknis&leger jalan;
- b. melaksanakan penyusunan program-program, mengolah, menyajikan, menyimpan, memelihara dan melakukan kegiatan pemutakhiran database jalan, drainase dan penahan badan jalan;
- c. melaksanakan survey pendataan dan analisa dan evaluasi tentang status fungsi peta jalan serta jembatan;
- d. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan ke-Bina Marga-an;
- e. melaksanakan kebijakan di Bidang Perencanaan Teknis dan Leger Jalan;
- f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan/pengendalian kegiatan pengadaan jasa konstruksi dan konsultasi;
- g. melaksanakan bantuan teknis perencanaan;
- h. melaksanakan pemberian rekomendasi teknis terhadap izin pemasangan fasilitas umum (utilitas) pada badan jalan dan manfaat badan jalan jembatan;
- i. melaksanakan pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembangunan jalan dan jembatan;
- b. melaksanakan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan peningkatan sarana jalan dan jembatan;
- c. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan ke-Bina Marga-an;
- d. melaksanakan kebijakan di bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja konstruksi prasarana dan sarana jalan dan jembatan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan jalan dan jembatan; melakukan survey, analisis struktur jalan dan jembatan, penelitian, melakukan rencana dan gambar mengenai geometri jalan, jembatan, dinding penahan dan drainase;
- h. melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, drainase dan dinding penahan jalan;
- i. melaksanakan pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi pada Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3.3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pemeliharaan Jalan & Jembatan meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemeliharaan jalan & jembatan;
- b. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan ke-Bina Marga-an;
- c. melaksanakan kebijakan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan pengelolaan data pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan/pengendalian pemeliharaan dan jembatan;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemasangan fasilitas umum (utilitas) pada badan jalan dan daerah milik jalan;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pemeliharaan jalan dan jembatan;
- i. melaksanakan survey, analisis struktur jalan dan jembatan, penelitian, melakukan rencana pemeliharaan jalan dan jembatan;
- j. melaksanakan penyusunan spesifikasi teknis dan estimasi biaya terhadap pemeliharaan jalan, jembatan, drainase dan dinding penahan jalan serta daerah milik jalan;
- k. melaksanakan pelaporan dan evaluasi Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas, Penyehatan Lingkungan serta Air Minum dan Limbah.

Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyehatan Lingkungan; dan

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Air Minum dan Limbah.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Cipta Karya meliputi :

- a. menyelenggarakan program kerja dan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Cipta Karya;
- b. menyelenggarakan fasilitasi keciptakaryaan;
- c. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan keciptakaryaan;
- d. menyelenggarakan fasilitasi dan pengembangan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis provinsi;
- e. menyelenggarakan fasilitasi dan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota;
- f. menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota;
- g. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan keciptakaryaan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.1. Seksi Penyehatan Lingkungan

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Penyehatan Lingkungan.

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Penyehatan Lingkungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyehatan Lingkungan; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyehatan Lingkungan.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Penyehatan Lingkungan meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyehatan lingkungan;
- b. melaksanakan pengelolaan data penyehatan lingkungan;
- c. melaksanakan fasilitasi terhadap kabupaten/kota dalam upaya pengembangan sistem sanitasi;
- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi Program Penyehatan Lingkungan;
- e. melaksanakan pengembangan infrastruktur Seksi Penyehatan Lingkungan;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan infrastruktur penyehatan lingkungan pada permukiman di kawasan strategis provinsi;

- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur Seksi Penyehatan Lingkungan;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan Seksi Penyehatan Lingkungan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penyehatan lingkungan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.2. Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Negara

Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas.

Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan pembangunan gedung dan rumah dinas;
- b. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan gedung dan rumah dinas;
- c. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan gedung dan rumah dinas;
- d. melaksanakan penyelenggaraan pembangunan gedung dan rumah dinas;
- e. melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi.
- f. melaksanakan fasilitasi dan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
- g. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pembangunan gedung dan rumah dinas;
- h. melaksanakan pengembangan jejaring kemitraan dalam Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas;
- j. melaksanakan bantuan teknis terhadap Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan gedung dan rumah dinas; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4.3. Seksi Air Minum dan Limbah

Seksi Air Minum dan Limbah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Air Minum dan Limbah.

Seksi Air Minum dan Limbah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Air Minum dan Limbah;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Air Minum dan Limbah; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Air Minum dan Limbah.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Air Minum dan Limbah meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis air minum dan limbah hasil pengelolaan air minum;
- b. melaksanakan pengelolaan data pada seksi air minum dan limbah hasil pengolahan air minum;
- c. melaksanakan fasilitasi terhadap kabupaten/kota dalam upaya pengembangan sistem pada seksi air minum dan limbah hasil pengolahan air minum;
- d. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan sinkronisasi program seksi Air Minum dan Limbah hasil pengolahan air minum;
- e. melaksanakan pengembangan infrastruktur seksi air minum dan air limbah hasil pengolahan air minum;
- f. melaksanakan fasilitasi dan pengembangan infrastruktur air minum pada permukiman di kawasan strategis provinsi;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan infrastruktur air minum dan limbah hasil pengolahan air minum;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan seksi air minum dan limbah hasil pengolahan air minum; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Perencanaan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang Pengawasan Penataan Ruang.

Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Penataan Ruang;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Penataan Ruang; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Penataan Ruang.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Penataan Ruang meliputi :

- a. menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan penetapan Perdanya;
- b. menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Peraturan Zonasi serta penetapan Perdanya;
- c. menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan Bidang Penataan Ruang;
- d. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penataan ruang antar kabupaten/kota;
- e. menyelenggarakan pengendalian perencanaan penataan ruang, pembinaan penataan ruang dan pengawasan penataan ruang; dan
- f. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan perencanaan penataan ruang, pembinaan penataan ruang, dan pengawasan penataan ruang;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.1. Seksi Perencanaan

Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perencanaan Penataan Ruang.

Seksi Perencanaan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Tata Ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan Penataan Ruang; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Penataan Ruang.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Perencanaan Penataan Ruang meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana tata ruang;
- b. melaksanakan penyusunan serta sinkronisasi program pemanfaatan ruang antar daerah;

- c. melaksanakan penyusunan program pengendalian pemanfaatan ruang melalui peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta peneanaan sanksi;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi;
- e. melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP);
- f. melaksanakan penyusunan perangkat insentif dan disinsentif tingkat Provinsi;
- g. melaksanakan integrasi RTRW dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
- h. melaksanakan penyediaan pusat data dan informasi penataan ruang yang terdiri dari perda, dokumen Penataan ruang dan data spasial;
- i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi di bidang Perencanaan penataan Ruang;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.2. Seksi Pembinaan

Seksi Pembinaan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pembinaan Penataan Ruang.

Seksi Pembinaan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Penataan Ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Penataan Ruang; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Penataan Ruang.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pembinaan Penataan Ruang meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan program & kegiatan Seksi Pembinaan Penataan Ruang ;
- b. melaksanakan sosialisasi kebijakan bidang penataan ruang (peraturan perundang-undangan dan pedoman penataan ruang) ;
- c. melaksanakan pemberian advokasi, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan penataan ruang kepada kabupaten/kota ;
- d. melaksanakan penyebarluasan informasi penataan ruang kepada ;
- e. melaksanakan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat ;
- f. melaksanakan pemberian izin pemanfaatan ruang tingkat Provinsi ;
- g. melaksanakan pembinaan pengembangan system informasi dan komunikasi penataan ruang kepada kabupaten/kota ;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi seksi Pembinaan Penataan Ruang ;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5.3. Seksi Pengawasan

Seksi Pengawasan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengawasan Penataan Ruang.

Seksi Pengawasan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengawasan Penataan Ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengawasan Penataan Ruang; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengawasan Penataan Ruang.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pengawasan Penataan Ruang meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan seksi pengawasan penataan ruang
- b. melaksanakan koordinasi dan kebijakan pengawasan penataan ruang;
- c. melaksanakan monitoring kinerja pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang di kabupaten/kota;
- d. melaksanakan monitoring pemenuhan penyediaan peta analog dan peta digital rencana tata ruang di kabupaten/kota;
- e. melaksanakan monitoring pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau sebesar 20 % dari luasan kawasan perkotaan di kabupaten/kota.
- f. melaksanakan pemberian sanksi pelanggaran penataan ruang tingkat provinsi;
- g. melaksanakan operasional penyidik pegawai negeri sipil (ppns) bidang penataan ruang;
- h. melaksanakan evaluasi pemanfaatan ruang tingkat provinsi;
- i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi terkait indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di kabupaten/kota;
- j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi seksi pengawasan penataan ruang;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. UPTD Laboratorium dan Bahan Konstruksi

Susunan organisasi UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi terdiri atas :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengujian Mutu Bahan
4. Seksi Pengujian Mutu Konstruksi
5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengujian mutu bahan/konstruksi.

UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional pengujian bahan/mutu konstruksi.
- b. Pelaksanaan pengelolaan, pengaturan, pemanfaatan, pemakaian alat-alat laboratorium untuk pengujian bahan/mutu konstruksi.
- c. Pelaksanaan operasional layanan pengujian pada masyarakat dan pihak ketiga sesuai dengan bidang pengujian bahan/mutu konstruksi.
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi untuk PAD Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- e. Pelaksanaan operasional tugas kedinasan sesuai dengan bidang pengujian bahan/mutu konstruksi.
- f. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan UPTD.
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. UPTD P2BG

Susunan organisasi UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung terdiri dari :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
4. Seksi Layanan Data dan Informasi
5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.

UPTD Pengawasan dan Pengendalian Bangunan dan Gedung mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
- c. Pelaksanaan operasional pelayanan pada masyarakat bidang pengawasan dan pengendalian bangunan dan gedung.
- d. Pelaksanaan teknis administrasi ketatausahaan UPTD.

- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. UPTD Workshop dan Peralatan

Susunan organisasi UPTD Workshop dan Peralatan terdiri :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Peralatan dan Layanan Gangguan
4. Seksi Workshop dan Perbekalan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Workshop dan Peralatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang penyiapan peralatan, bahan jalan/jembatan, perbengkelan, layanan gangguan dan pembinaan peralatan.

UPTD Workshop dan Peralatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengelolaan, pengawasan, pengaturan, pemanfaatan dan pemakaian asset kekayaan daerah berupa peralatan penunjang untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.
- b. Pelaksanaan pemeliharaan dan operasional peralatan.
- c. Pelaksanaan pekerjaan layanan gangguan pada jalan/jembatan akibat bencana alam.
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi atas sewa peralatan untuk PAD.
- e. Pelaksanaan teknis standard administrasi dan operasional peralatan.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI

Susunan organisasi UPTD Jalan Jembatan Wilayah I-VI terdiri dari :

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Jalan dan Jembatan I
4. Seksi Jalan dan Jembatan II
5. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program/anggaran kegiatan, pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin dan berkala serta pengendalian/evaluasi hasil pemeliharaan teknis jalan dan jembatan.

UPTD Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelaksanaan penyusunan program kegiatan dan anggaran pemeliharaan rutin/berkala jalan dan jembatan
- b. Penyelenggaraan penyusunan kerangka acuan kerja, estimasi biaya dan penyiapan dokumen-dokumen teknis pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan.
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan.
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten/kota atas pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala konstruksi jalan dan jembatan.
- e. Pemberian bantuan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan pada masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat yang membutuhkan.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum tahun 2020 ditampilkan pada *Gambar 1.1*. Dari struktur organisasi dapat dijelaskan bahwa formasi tenaga struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020 terdiri dari :

1. Kepala Dinas : Eselon II (1 orang)
2. Sekretaris : Eselon III (1 orang)
3. Kepala Bidang : Eselon III (3 orang)
4. Kepala UPTD : Eselon III (9 orang)
5. Kepala Seksi : Eselon IV (27 orang)
6. Kasubag : Eselon IV (11 orang)

1.1.4 Sumber Daya Manusia

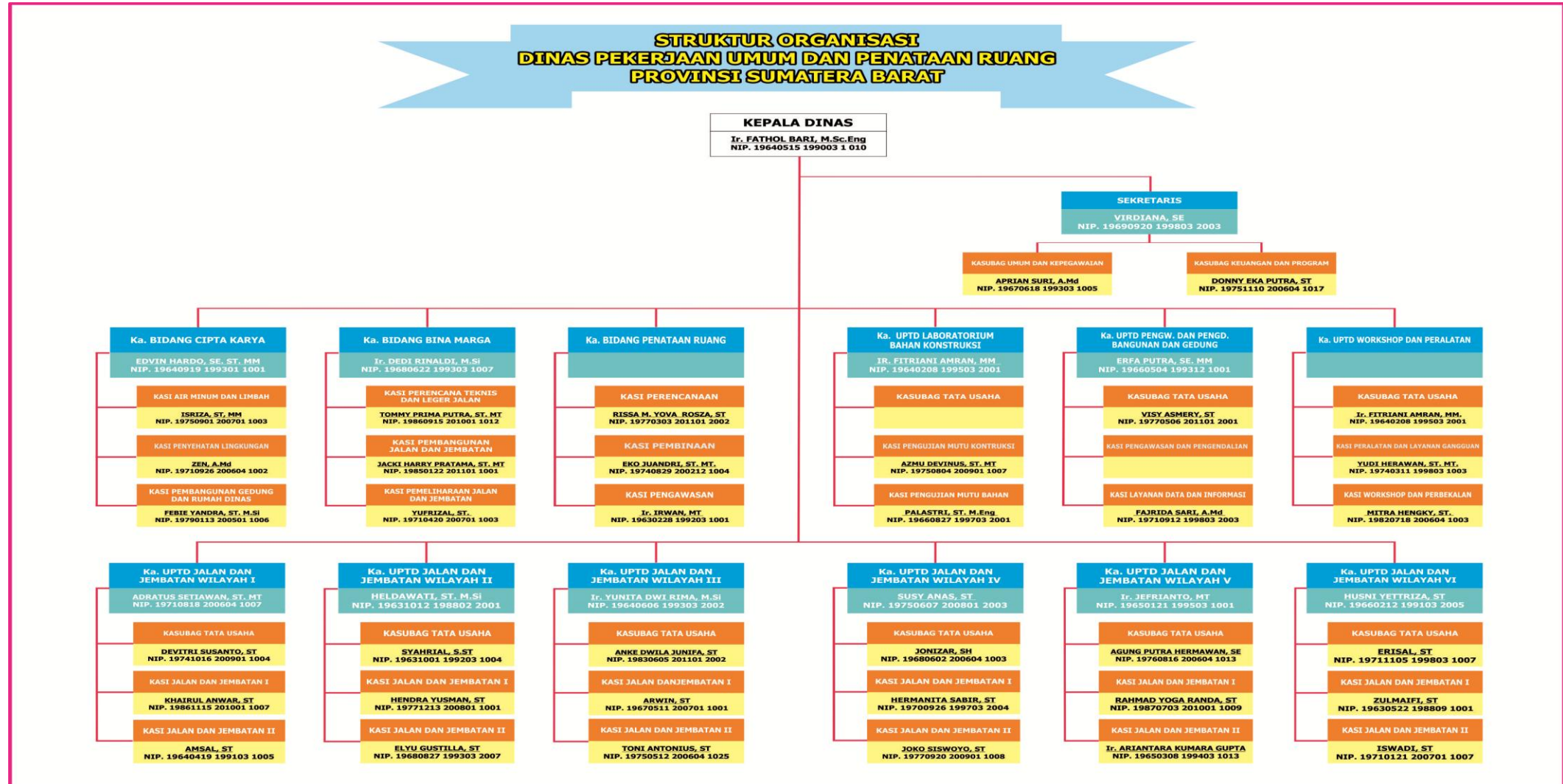
Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data akhir tahun 2020 sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan jenis kelamin pemetaan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumbar ditampilkan pada *tabel 1.1*.

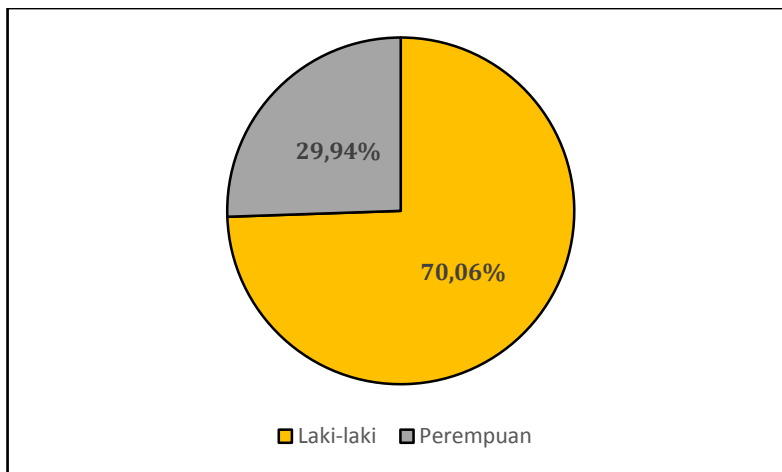
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki-laki	248 orang	70,06%
Perempuan	106orang	29,94%

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas PUPR tahun 2020





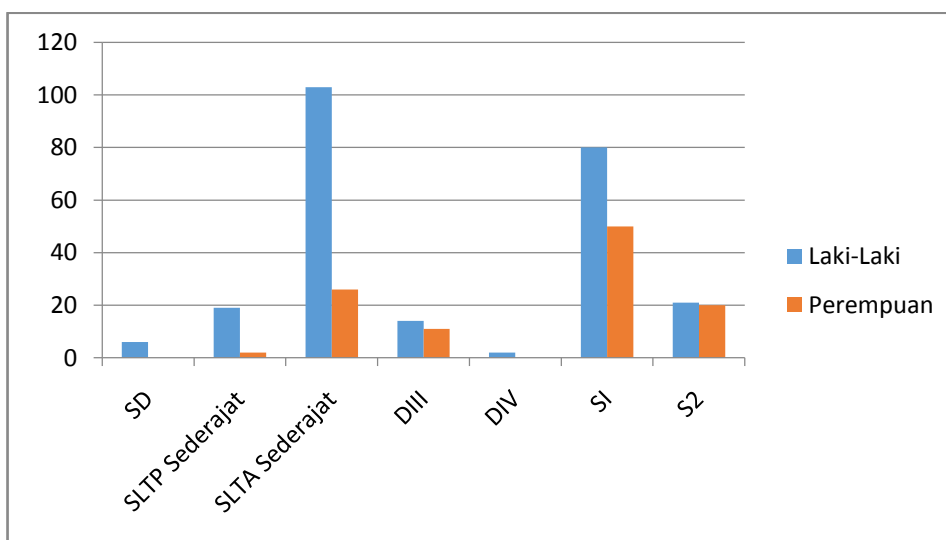
Gambar 1.2 Proporsi Pegawai Dinas PUPR berdasarkan kelamin Tahun 2020

Pemetaan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya ditampilkan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
SD	6	-	6
SLTP Sederajat	19	2	21
SLTA Sederajat	103	26	129
DIII	14	11	25
DIV	2	-	2
S1	80	50	130
S2	21	20	41
Jumlah	245	109	354

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR



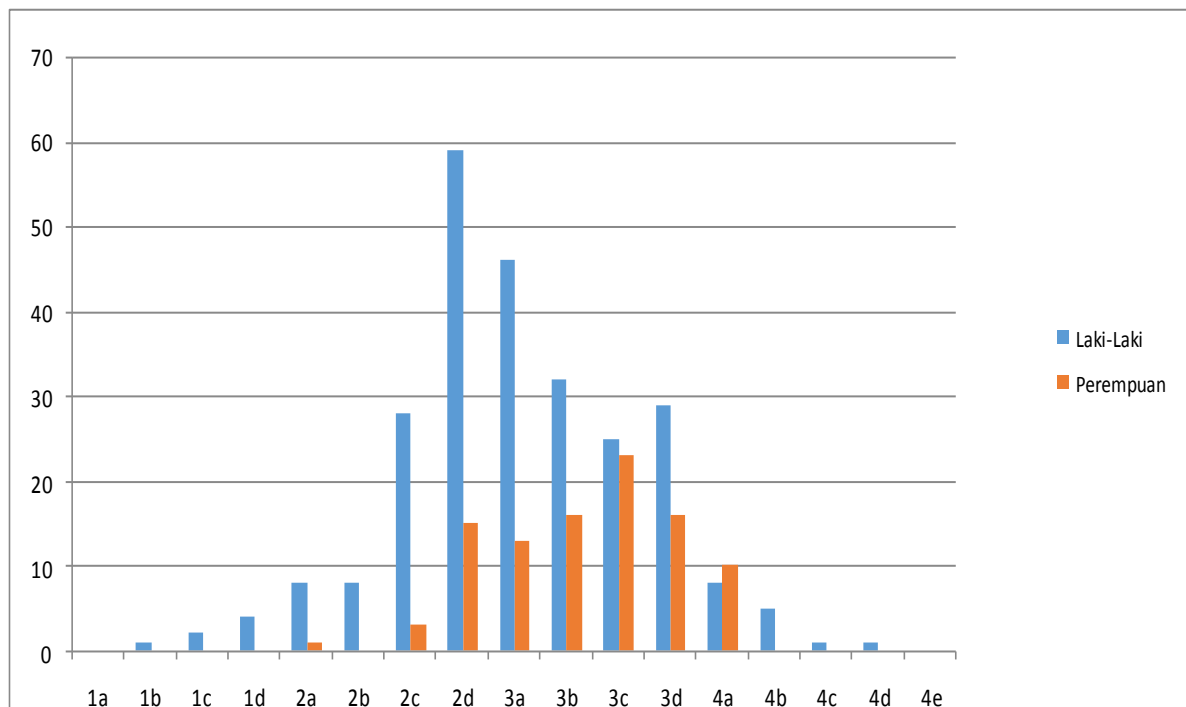
Gambar 1.3 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sedangkan, pemetaan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pangkat/golongan ditampilkan pada *tabel 1.3*.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan pangkat/golongan

Golongan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1A	-	-	0
1b	1	-	1
1c	2	-	2
1d	4	-	4
2a	8	1	9
2b	8	-	8
2c	28	3	31
2d	59	15	74
3a	46	13	59
3b	32	16	48
3c	25	23	48
3d	29	16	45
4a	8	10	18
4b	5	-	5
4c	1	-	1
4d	1	-	1
4e	-	-	-

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR



Gambar 1.4 Grafik Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Golongan Tahun 2020

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat yang kemudian berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat terutama melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, air minum, air limbah, pembangunan gedung atau bangunan negara serta penataan ruang. Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Hal tersebut dilakukan dengan cara pembangunan dan peningkatan pada jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir, meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan, serta meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan. Dengan adanya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Pemeliharaan dan rehabilitasi ruas jalan yang ada juga diperlukan untuk mempertahankan kondisi kemnatapan jalan yang ada.

Disamping itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat juga memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan akan akses air minum dan sanitasi yang layak di Provinsi Sumatera Barat. Peran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lainnya adalah pembangunan gedung negara, shelter dan bangunan lainnya dalam rangka rekonstruksi bangunan yang ada di Sumatera Barat. Pembangunan bangunan strategis yang dilakukan pada tahun 2020 yaitu Lanjutan Pembangunan Main Stadium Sumatera Barat dan Guest House Gubernur.

Penataan Ruang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai daya dukung lingkungan dan berkelanjutan. Pada Tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang pada Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP Mandeh) dan RTR KSP Pasopala. Selain itu Dinas PUPUR juga melakukan penyusunan database ke PUan dan Tata Ruang Provinsi, Kabupaten dan Kota serta beberapa rencana tata ruang lainnya.

Adapun program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan perwujudan atas misi Gubernur yaitu Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas PUPUR dapat

mengurangi kesenjangan antar kawasan, meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan.

1.3 Permasalahan Utama (Strategic Issues) yang dihadapi Organisasi

Pembangunan Sumatera Barat telah mengalami kemajuan dan keberhasilan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian masih terdapat berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus ditangani segera melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan. Di bidang infrastruktur, Sumatera Barat menghadapi tantangan untuk terus berbenah menuju infrastruktur yang andal, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah salah satu OPD yang terlibat langsung dalam permasalahan infrastruktur yang ada di Sumatera Barat.

Permasalahan utama terkait infrastruktur salah satunya adalah upaya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah masih terkendala. Penyebabnya adalah (1) masih terdapat jalan yang belum terhubung antar wilayah dan terisolir karena faktor pembebasan lahan dan keterbatasan anggaran (2) kemantapan jalan provinsi sebesar 73,92% dengan deviasi yang cukup jauh jika dibandingkan dengan kemantapan jalan nasional yaitu 90,92 % sehingga perlu upaya pembangunan dan pemeliharaan jalan yang berkesinambungan agar nilai kemantapan jalan provinsi setidaknya mencapai 75% pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra).

Disamping itu, upaya pemenuhan kebutuhan dasar berupa akses air minum dan sanitasi layak juga masih mengalami berbagai kendala, antara lain (1) masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat (2) Keterbatasan ketersediaan sumber air baku di kabupaten/kota. (3) kesulitan penyediaan lahan karena terkendala pembebasannya sesuai dengan kriteria pembangunan infrastruktur dan (4) Terbatasnya ketersediaan dana pembangunan.

Hal serupa, dibidang Penataan Ruang terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu (1) masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan dan belum terbangunnya kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan terutama pemanfaatan ruang (2) rendahnya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang, terbatasnya pedoman acuan pemanfaatan ruang dan upaya memasyarakatkannya.

Pembangunan infrastruktur telah menggerakkan ekonomi riil serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar khususnya di sektor jasa konstruksi. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku Jasa

Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global. Secara regulasi, hal tersebut telah memiliki payung hukum yang jelas dengan adanya UU Jasa Konstruksi mengenai klasifikasi dan kualifikasi, pelatihan tenaga kerja konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja, registrasi pengalaman profesional, upah tenaga kerja konstruksi, dan pengaturan tenaga kerja konstruksi asing serta tanggung jawab profesi. Dengan demikian, Dinas PUPR perlu mengawasi implementasi Undang-undang tersebut dan terus membina sektor jasa konstruksi agar semakin baik dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang andal.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 yaitu **“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**

Sejalan dengan pencapaian visi tersebut, misi Gubernur Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya, berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional,
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi,
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional, global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah,
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

2.1 Peran Strategis

Didalam dokumen awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan perubahan RPJMD Sumatera Barat (2016 – 2021) yang dibuat tahun 2018, dinyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Barat merupakan OPD yang memiliki peran strategis dan tanggungjawab untuk mendukung pencapaian misi 2 (dua) dan terutama misi 5 (lima) Gubernur Sumatera Barat seperti ditampilkan pada *tabel 2.1*.

Tabel 2.1 Peran Strategis Dinas PUPR dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

No	Misi Gubernur ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-	Strategi	Arah Kebijakan
1.	2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.	1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal serta pengawasan masyarakat dan ketegasan tindaklanjut b. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah c. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah d. Melakukan penguatan kelembagaan pengadaan barang dan jasa e. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government) f. Melakukan penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan indikator kinerja daerah, Perangkat Daerah dan individu aparatur. b. Penertiban dan tindaklanjut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dst... (RPJMD VI-5)

No	Misi Gubernur ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-	Strategi	Arah Kebijakan
				pemerintahan nagari/desa/kelurahan Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik g. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah	
2.	5. Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan penyediaan Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	1. Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi	a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan provinsi b. Meningkatkan kerjasama pembangunan dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah	a. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan provinsi b. Rehabilitasi jalan dan jembatan provinsi c. Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan hubungan dan pengembangan wilayah . d. Penyediaan dukungan untuk pembangunan infrastruktur prioritas dan strategis nasional (dukungan pembangunan jalan tol Padang – Batas Riau dan lain-lain)

No	Misi Gubernur ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-	Strategi	Arah Kebijakan
3.	5. Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan penyediaan Infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	5. Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung	a. Membenahi prasarana dan sarana umum di kawasan pemukiman/ perumahan dan lingkungan b. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan	a. Pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh. b. Pengembangan sistem pengelolaan air minum regional, tempat pembuangan akhir regional, dan drainase. c. Peningkatan kualitas dan penataan bangunan dan lingkungan
4.	5. Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	2. Meningkatkan Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	1. Meningkatnya Kesesuaian rencana Pembangunan dengan tata ruang	a. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW b. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan RTRW sesuai kebutuhan pembangunan dan aturan yang berlaku	a. Penyusunan regulasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata ruang. b. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi c. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang Peningkatan keterkaitan

No	Misi Gubernur ke-	Tujuan ke-	Sasaran ke-	Strategi	Arah Kebijakan
					d. antar pusat kegiatan sesuai dengan hirarki pengembangan sistim perkotaan

Sumber : Dokumen perubahan RPJMD Provinsi Sumbar (2016-2021)

Sedangkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-1038-2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-832-2018 Tentang Penetapan Hasil Rekomendasi Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 28 Desember 2018 dinyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai peran strategis dan tanggungjawab untuk mendukung pencapaian misi 5 (lima) Gubernur Sumatera Barat seperti ditampilkan pada *tabel 2.2*.

Tabel 2.2 Tabel Penyesuaian Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN GUBERNUR	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
MISI 5: Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				
6	Meningkatkan fungsi infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	6.1 Meningkatnya Konektivitas dan aksesibilitas wilayah 6.5 Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat	6.1.1 Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap 6.5.1 Persentase Cakupan Infrastruktur Layanan Masyarakat

Sumber : Lampiran II Keputusan Gubernur No. 065 - 1038 - 2018 (Biro Organisasi)

Sasaran Strategis Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang tertuang di dalam Cascading Perubahan sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-1038-2018 tersebut, selanjutnya akan menjadi **tujuan** dari OPD penanggung jawab/pendukung. Mengacu pada perubahan cascading Gubernur Provinsi Sumatera Barat sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-1038-2018 itu pula, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga ikut mengalami revisi cascading terkait sasaran dan tujuan Kepala Dinas (Eselon II). Perubahan cascading pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut sudah dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Secara ringkasnya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD awal yang menjadi dasar Perjanjian Kinerja Eselon II dapat dilihat pada *tabel 2.3*.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja & Target Capaian Dinas PUPR sesuai RPJMD 2016-2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun -						Kinerja akhir periode RPJMD
				2016	2017	2018	2020	2020	2021	
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	BB	BB	A	A	A
2	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	91,13% / 69%	70%	71%	72%	73%	74%	75%	75%
	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	*Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	22 unit	5 unit	8 unit	8 unit	3 unit	5 unit	3 unit	54 unit
		Persentase cakupan air minum	68%	70%	72%	75%	80%	83%	86%	86%
		Persentase cakupan sanitasi	66,84%	72%	73%	75%	78%	79%	80%	80%
3	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	79%	80%	81%	82%	83%	84%	86%	86%

Sumber :Revisi Renstra dan LAKIP 2018

Keterangan : * tidak digunakan lagi pada PK (Perjanjian Kinerja) Perubahan Eselon II tahun 2020 berdasarkan hasil review *Cascading* dan rekomendasi tim evaluator SAKIP dari Biro Organisasi dan Inspektorat pada awal tahun 2020.

2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai. Dalam hal ini Visi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah **“Mewujudkan Infrastruktur yang handal, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”**.

Infrastruktur yang **handal** dapat diartikan sebagai tingkat kondisi ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang berkualitas, menghubungkan antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat dan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan Gubernur yaitu meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Dengan meningkatnya konektivitas antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat melalui prasarana jalan yang handal, maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, infrastruktur yang dimaksud juga mencakup aspek Keciptakarya yang berkualitas yang dapat diterjemahkan melalui penataan bangunan yang kokoh dan sesuai dengan fungsinya, cakupan pelayanan air minum yang layak, dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan yang nyaman dan asri. Adapun Penataan Ruang yang berkelanjutan dalam hal ini adalah tersedianya penataan ruang yang efisien, berkelanjutan dan konsisten sehingga dapat dijadikan acuan dan rujukan dalam kegiatan pembangunan guna terciptanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antar aspek-aspek pembangunan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja organisasi (tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel).
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah terkait konektivitas-aksesibilitas wilayah.
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah terkait penyediaan sarana prasarana umum serta pelayanan dasar masyarakat.
4. Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan.

Perencanaan Kinerja Dinas PUPR pada dasarnya mengacu pada dokumen RPJMD (2016-2021) dan visi misi Kepala Dinas yang diturunkan dari Visi-Misi Gubernur. Adapun Perencanaan Kinerja Dinas PUPR tahun 2020 ditunjukkan oleh *tabel 2.4*.

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	Persentase Jalan Mantap	74 %
2	Meningkatnya Cakupan Air Minum	Persentase Cakupan Air Minum	80 %
3	Meningkatnya Cakupan Sanitasi	Persentase Cakupan Sanitasi	79 %
4	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	84 %
5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB

Perencanaan Kinerja berisikan target dan indikator kinerja dari sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ingin dicapai pada tahun 2020. Berdasarkan perencanaan kinerja tersebut maka dibuat Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (Eselon II) sebagai bentuk komitmen antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Gubernur Sumatera Barat selaku Kepala Daerah. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (Eselon II) mencakup semua program kegiatan yang ada pada dinas untuk mewujudkan target kinerja yang direncanakan pada tahun 2020. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada awal Tahun 2020 ditunjukkan oleh *tabel 2.5*.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Awal Kepala Dinas PUPR tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	Persentase Jalan Mantap	74.00 %
3	Meningkatnya Cakupan Air Minum	Persentase Cakupan Air Minum	80.00 %
4	Meningkatnya Cakupan Sanitasi	Persentase Cakupan Sanitasi	79.00%
5	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	84.00 %

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.751.544.240	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.674.697.000	APBD
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	275.660.000	APBD
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	250.000.000	APBD
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.762.680.000	APBD
6	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	150.827.219.484	APBD, DAK
7	Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi	870.024.960.000	APBD
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-Binamargaan	1.691.300.672	APBD
9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.200.000.000	APBD
10	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	157.900.761.400	APBD
11	Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	1.176.000.000	APBD
12	Perencanaan Tata Ruang	4.300.000.000	APBD
13	Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah	600.000.000	APBD
14	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/ kota	650.000.000	APBD
15	Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi	5.885.000.000	APBD
16	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	300.000.000	APBD
	JUMLAH	422.247.358.796	

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas PUPR tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	Persentase Jalan Mantap	74.00 %
3	Meningkatnya Cakupan Air Minum	Persentase Cakupan Air Minum	80.00 %
4	Meningkatnya Cakupan Sanitasi	Persentase Cakupan Sanitasi	79.00%
5	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	84.00 %

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.845.652.183	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.174.552.520	APBD
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	-	APBD
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	92.280.800	APBD
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1.509.643.000	APBD
6	Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	42.673.814.816	APBD, DAK
7	Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi	126.046.032.140	APBD
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-Binamargaan	1.092.718.300	APBD
9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.229.704.200	APBD
10	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	160.829.254.184	APBD
11	Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	526.000.000	APBD
12	Perencanaan Tata Ruang	1.168.826.750	APBD
13	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	344.289.200	APBD
14	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/ kota	258.245.400	APBD
15	Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi	607.476.140	APBD
16	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	175.000.000	APBD
	JUMLAH	344.573.489.633	

Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas (Eselon II) dapat dijelaskan bahwa sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a) Meningkatkan tata kelola organisasi

Adapun tata kelola organisasi Dinas PUPR mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi.

b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan

Salah satu indikator dalam meningkatnya kualitas dan kuantitas wilayah adalah meningkatnya kemantapan jalan. Kemantapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

c) Meningkatkan cakupan air minum

Meningkatkan penyediaan layanan air minum di Provinsi Sumatera Barat.

d) Meningkatkan cakupan sanitasi

Meningkatkan penyediaan layanan sanitasi di Provinsi Sumatera Barat.

e) Meningkatkan kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang. Tercapainya kinerja penataan ruang yang tinggi seperti yang diatur dalam UU No 9 Tahun 2015 dan UU No. 26 Tahun 2007.

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2020. Untuk menghitung besaran persentase capaian kinerja, secara matematis ditulis sebagai berikut :

a.) $\frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$ (realisasi yang **besar** menunjukkan **kinerja baik**)

Artinya : Semakin besar % capaian kinerja, maka semakin baik kinerja suatu indikator , demikian sebaliknya.

b.) $\frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$ (realisasi yang **besar** menunjukkan kinerja **tidak baik**)

Artinya : Semakin besar % capaian kinerja, maka semakin buruk/tidak baik kinerja suatu indikator , demikian sebaliknya.

Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat metode pengukuran capaian kinerja untuk semua indikator kinerja menggunakan metode yang (a).

Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat serta menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalannya. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan.

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada tahun 2020, ada 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Rekapitulasi Realisasi Indikator Kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	Tim evaluator
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	Persentase Jalan Mantap	74,00 %	73,92 %
3.	Meningkatnya Cakupan Air Minum	Persentase Cakupan Air Minum	80,00 %	80,04 %
4.	Meningkatnya Cakupan Sanitasi	Persentase Cakupan Sanitasi	79,00%	81,68 %
5.	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	84,00 %	84,00 %

3.3 Capaian Kinerja Organisasi

Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan kategori penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2 Klasifikasi Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis Dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	75% - 84%	Baik
3	56% - 74%	Cukup
4	< 55%	kurang

Untuk menghitung besaran persentase capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

3.3.1 Capaian Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja

Pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat menargetkan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah BB. Hasil pengukuran indikator kinerja ini berdasarkan hasil penilaian LAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat selaku tim evaluator Provinsi dan Biro Organisasi selaku OPD pembimbing.

Tabel 3.3 Pengukuran Target Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	Tim evaluator

3.3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Untuk persentase nilai akuntabilitas kinerja, (%) capaian adalah perbandingan antara target dan realisasi yang secara matematis ditulis sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{BB}}{\text{BB}} \times 100$$

BB

$$\% \text{ capaian} = 100 \%$$

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100%

Dengan pencapaian atas target sebesar 100% tersebut maka klasifikasi penilaian untuk Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah **Sangat Baik**.

3.3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi kinerja dan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2018, 2019 & 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2018, 2019 & 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB	100	100	100

Sumber data : LAKIP 2018, 2019

3.3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun 2020 terhadap Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dihitung dengan rumus :

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2020 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2020	TARGET 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	A

3.3.2 Capaian Kinerja Indikator Persentase Jalan Mantap

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 600-903.1-2015 tentang Penetapan Ruas-ruas jalan menurut Fungsi dan Statusnya diketahui bahwa total panjang jalan provinsi Sumatera Barat adalah 1525,20 km. Pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat menargetkan persentase kemantapan jalan provinsi sebesar 74 %. Berdasarkan laporan hasil survey IRMS yang telah dilakukan, diperoleh bahwa Persentase kemantapan jalan provinsi pada Tahun 2020 sebesar 73,92%. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

$$\% \text{ kemantapan jalan} = \frac{\text{total panjang jalan mantap per ruas (km)}}{\text{total panjang jalan provinsi (km)}} \times 100\%$$

$$\% \text{ kemantapan jalan} = \frac{1127,359}{1525,200} \times 100 \%$$

$$\% \text{ kemantapan jalan} = 73,92 \%$$

Hal ini menunjukkan bahwa telah tercapainya target persentase jalan mantap provinsi untuk tahun 2020 seperti ditampilkan pada Tabel 3.11.

Tabel 3.7 Pengukuran Target Kinerja Kemantapan Jalan Dinas PUPR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	Persentase jalan mantap	74%	73.92%

Sumber data : Laporan Akhir Survey IRMS 2020

Berdasarkan IKU Gubernur Provinsi Sumatera Barat diketahui bahwa penetapan ruas jalan yang terkoneksi jalan mantap diukur berdasarkan jumlah ruas jalan di Provinsi Sumatera Barat dengan kondisi mantap $\geq 72\%$. Dari laporan hasil survey IRMS yang dilakukan diketahui bahwa jumlah ruas jalan yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap $\geq 72\%$ pada tahun 2020 adalah sebanyak 44 ruas seperti ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8 Pengukuran Target Kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar Jumlah Ruas Jalan yang terkoneksi dengan Kondisi Jalan Mantap

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi dengan kondisi jalan mantap	38	44

Sumber data : Laporan Akhir Survey IRMS 2020

Hasil pengukuran indikator Persentase kemantapan jalan berdasarkan laporan akhir survey IRMS (*Integrated Road Management System*) ditampilkan pada tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.9 Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Barat Per Ruas Tahun 2020

No	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KABUPATEN/KOTA YANG DILALUI	PANJANG RUAS SURVEY (KM)	PNJANG RUAS (Km)	KEMANTAPAN			
						MANTAP		TIDAK MANTAP	
						KM	%	KM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	P007	Simancung - Tj. Ampalu	Kabupaten Sijunjung	10.60	11.08	8.57	77.36%	2.51	22.64%
2	P008	Tj. Ampalu-Sijunjung	Kabupaten Sijunjung	19.80	20.00	15.35	76.77%	4.65	23.23%
3	P010	Simp. Sikabau -Simp. Koto Baru	Kabupaten Dharmasraya	29.48	29.00	25.46	87.79%	3.54	12.21%
4	P011	Simp. Koto Baru -Tj. Simalidu	Kabupaten Dharmasraya	12.10	11.90	9.24	77.69%	2.66	22.31%
5	P012	Simp. Koto Baru -Junction	Dharmasraya	5.17	5.40	5.19	96.13%	0.21	3.87%
6	P018	Indera Pura-Muara Sakai	Kabupaten Pesisir Selatan	7.00	7.30	7.09	97.14%	0.21	2.86%
7	P025	Manggopoh-Padang Luar	Kabupaten Agam	68.14	69.43	57.41	82.68%	12.02	17.32%
8	P028	Sicincin-Kurai Taji	Kabupaten Padang Pariaman	16.63	16.44	15.45	93.98%	0.99	6.02%
9	P031	Panti -Simpang Empat	Kabupaten Pasaman - Kabupaten Pasaman Barat	73.90	74.23	62.78	84.57%	11.45	15.43%
10	P033	Simpang Empat -Sasak	Kabupaten Pasaman Barat	20.00	20.00	18.80	94.00%	1.20	6.00%
11	P034	Air Balam-Air Bangis	Kabupaten Pasaman Barat	12.89	12.60	12.60	100.00%	-	0.00%
12	P035	Kubu Kerambil-Bts.	Kabupaten Tanah Datar	18.60	18.50	15.52	83.87%	2.98	16.13%

No	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KABUPATEN/KOTA YANG DILALUI	PANJANG RUAS SURVEY (KM)	PNJANG RUAS (Km)	KEMANTAPAN			
						MANTAP		TIDAK MANTAP	
						KM	%	KM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Batusangkar (Simp. Kiambang)							
13	P036	Baso-Bts. Batusangkar (Balai Selasa)	Kabupaten Agam- Kabupaten Tanah Datar	28.60	28.79	27.98	97.20%	0.81	2.80%
14	P037	Batas Batusangkar (Bukit Gombak) -Guguk Cino	Kabupaten Tanah Datar	13.71	10.40	8.28	79.57%	2.12	20.43%
15	P038	Guguk Cino-Sawahlunto (Lapangan Segitiga)	Tanah Datar - Kota Sawahlunto	30.12	30.60	24.50	80.08%	6.10	19.92%
16	P039	Guguk Cinoi -Sitangkai	Kabupaten Tanah Datar	14.50	15.12	11.99	79.31%	3.13	20.69%
17	P040	Sitangkai -Tj. Ampalu	Kabupaten Tanah Datar - Kabupaten Sijunjung	17.28	17.28	13.08	75.69%	4.20	24.31%
18	P044	Bts. Kota Payakumbuh-Sitangkai	Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai	46.04	50.61	39.62	78.28%	10.99	21.72%
19	P054	Junction -Abai siat	Kabupaten Solok Selatan	12.38	12.60	12.60	100.00%	-	0.00%
20	P055	Sijunjung -Tanah Badantung	Kabupaten Sijunjung	4.14	4.40	3.41	77.39%	0.99	22.61%
21	P056.1	Simp. Padang Aro-Lubuk Malako	Kabupaten Solok Selatan	19.24	20.00	16.67	83.37%	3.33	16.63%
22	P056.2	Lubuk Malako-Abai Sangir	Kabupaten Solok Selatan	16.00	17.00	13.18	77.50%	3.83	22.50%
23	P056.3	Abai Sangir-Sei. Dareh	Kabupaten Dharmasraya	74.00	74.00	18.80	25.41%	55.20	74.59%
24	P068	Padang Sawah-Kumpulan	Kabupaten Pasaman	36.10	36.50	31.65	86.70%	4.85	13.30%
25	P069.2	Bts. Payakumbuh - Suliki-Koto	Kota Payakumbuh -	42.15	46.85	44.18	94.31%	2.67	5.69%

No	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KABUPATEN/KOTA YANG DILALUI	PANJANG RUAS SURVEY (KM)	PNJANG RUAS (Km)	KEMANTAPAN			
						MANTAP		TIDAK MANTAP	
						KM	%	KM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tinggi	Kabupaten 50 Kota						
26	P070	Batusangkar-Ombilin	Kabupaten Tanah Datar	16.48	18.51	14.91	80.58%	3.60	19.42%
27	P071	Solok-Alahan Panjang			47.80	42.00	87.87%	5.80	12.13%
28	P072	Lubuk Basung-Sungai Limau	Kabupaten Agam- Kabupaten Padang Pariaman	28.88	30.90	29.62	95.84%	1.28	4.16%
29	P073	Pasar Baru-Alahan Panjang			49.40	35.60	72.06%	13.80	27.94%
30	P075	Simp. Duku (Ketaping)- Pariaman	Kabupaten Padang Pariaman-Kota Pariaman	22.25	20.50	19.95	97.30%	0.55	2.70%
31	P076	Pangkalan Koto Baru - Sialang Gelugur	Kabupaten Lima Puluh Kota	73.95	73.95	49.20	66.53%	24.75	33.47%
32	P078	Simpang Koto Mambang - Balingka	Kabupaten Padang Pariaman – Kabupaten Agam	37.60	39.40	38.98	98.94%	0.42	1.06%
33	P079	Baso-Piladang	Kabupaten Agam	10.50	11.14	6.58	59.05%	4.56	40.95%
34	P080	Matur-Palembayan	Kabupaten Agam	21.34	20.70	18.63	89.99%	2.07	10.01%
35	P081	Palembayan-Palupuh (Simp. Patai)	Kabupaten Agam	12.20	13.30	11.56	86.89%	1.74	13.11%
36	P082	Alahan Panjang-Kiliran Jao			72.90	30.57	41.93%	42.33	58.07%
37	P083	Teluk Kabung - Mandeh- Tarusan			44.10	44.10	100.00%	-	0.00%
38	P084	Lingkar Selatan (Payakumbuh)	Kota Payakumbuh	13.94	14.17	12.75	89.96%	1.42	10.04%

No	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KABUPATEN/KOTA YANG DILALUI	PANJANG RUAS SURVEY (KM)	PNJANG RUAS (Km)	KEMANTAPAN			
						MANTAP		TIDAK MANTAP	
						KM	%	KM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	P085	Simpang Padang Karambia -Tj. Bungo (TPA Regional)	Kota Payakumbuh	2.00	2.05	2.05	100.00%	-	0.00%
40	P086	Surantiah - Kayu Aro-Langgai			27.70	16.73	60.40%	10.97	39.60%
41	P087	Duku-Sicincin	Kabupaten Padang Pariaman	28.65	28.65	6.25	21.82%	22.40	78.18%
42	P088	Padang Koto Gadang-Palembayan	Kabupaten Agam	30.58	31.00	27.76	89.54%	3.24	10.46%
43	P089	Balingka - Terowongan-Ngarai Sianok			9.70	-	0.00%	9.70	100.00 %
44	P090	Palupuh - Pua gadih -Koto Tinggi	Kabupaten Agam - kabupaten 50 Kota	27.29	25.00	18.59	74.34%	6.41	25.66%
45	P091	Simpang Napar - Bukit Bual-Tanjung Ampalu	Kabupaten Sijunjung - Kota Sawahlunto	14.69	23.00	20.18	87.75%	2.82	12.25%
46	P092	Sp. Ganting Payo -Batas Tanah Datar – Sumani	Kabupaten Tanah Datar - Kabupaten Solok	29.97	28.40	27.26	96.00%	1.14	4.00%
47	P093	Singkarak - Aripas-Tj. Balit-Padang Ganting	Kabupaten Solok-Kabupaten Tanah Datar	38.75	30.00	21.48	71.61%	8.52	28.39%
48	P094	Pintu Angin-Labuah Saiyo	Kabupaten Solok	5.59	5.50	5.50	100.00%	-	0.00%
49	P095	Rao-Rokan (Batas Riau)	Kabupaten Pasaman	32.66	33.00	28.55	86.53%	4.45	13.47%
50	P096	Lubuk Sikaping-Talu	Kabupaten Pasaman - Kabupaten Pasaman Barat	28.91	28.00	20.06	71.64%	7.94	28.36%
51	P097	Bungo Tanjung -Teluk Tapang	Kabupaten Pasaman	43.20	43.20	15.80	36.57%	27.40	63.43%

No	NO RUAS	NAMA RUAS JALAN	KABUPATEN/KOTA YANG DILALUI	PANJANG RUAS SURVEY (KM)	PNJANG RUAS (Km)	KEMANTAPAN			
						MANTAP		TIDAK MANTAP	
						KM	%	KM	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Barat						
52	P098	Teluk Bayur-Nipah-Purus	Kota Padang	10.40	12.00	9.00	75.00%	3.00	25.00%
53	P099	Purus-Bandara Internasional Minangkabau	Kota Padang-Kabupaten Padang Pariaman	16.00	16.00	2.40	15.00%	13.60	85.00%
54	P100	Batu Batembak-Pelabuhan Panasahan	Kabupaten Pesisir Selatan	1.00	1.20	1.20	100.00%	-	0.00%
55	P101	Tapus - Muaro Sei. Lolo-Gelugur	Kabupaten Pasaman	47.20	47.00	21.11	44.92%	25.89	55.08%
56	P102	Rawang-Talawi	Kabupaten Solok - Kota Sawahlunto	4.57	6.00	3.37	56.25%	2.63	43.75%
57	P103	Simp. SP II-Kantor Camat	Kabupaten Mentawai	4.31	5.10	4.63	90.71%	0.47	9.29%
58	P104	Kantor Camat -Berkat	Kabupaten Mentawai	5.90	5.90	1.60	27.12%	4.30	72.88%
		TOTAL		1,257.32	1,525.20	1,127.36	73.92	397.84	26.08

Sumber data : Laporan Akhir Survey IRMS 2020

3.3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Untuk persentase kemantapan jalan provinsi, (%) capaian adalah perbandingan antara target dan realisasi yang secara matematis ditulis sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{73,92}{73,00} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 99,89 \%$$

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Indikator Persentase Jalan Mantap

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	Persentase jalan mantap	74%	73.92 %	99.89%

Dengan pencapaian atas target sebesar 99.89% tersebut maka klasifikasi penilaian untuk persentase kemantapan jalan provinsi adalah **Sangat Baik**.

3.3.2.2 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi kinerja dan capaian Persentase Jalan Mantap pada tahun 2018 2019 & 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Jalan Mantap tahun 2018, 2019 & 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Persentase jalan mantap	72	73	74	72.058 (36ruas)	73.015 (40 ruas)	73.92 (44 ruas)	100.08	100.02	99.89

Sumber data : LAKIP 2018, 2019

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi persentase (%) kemantapan jalan dari tahun 2018, 2019 dan 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan jumlah ruas jalan yang kondisinya mantap juga meningkat dari tahun sebelumnya.

3.3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun 2020 terhadap Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi 2020}}{\text{Target 2021}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{73,92}{75,00} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 98,56 \%$$

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2020 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2020	TARGET 2021	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan	Persentase jalan mantap	73,92%	75 %	98,56%

3.3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Standar Nasional

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Balai Pelaksanaan Jalan Wilayah III Provinsi Sumatera Barat diketahui bahwa Persentase kemantapan Jalan Nasional tahun 2020 sebesar 90,92 %, sementara kemantapan jalan Provinsi berada pada posisi 73,92 %. Hal ini mengindikasikan bahwa kemantapan jalan nasional lebih tinggi 17 % dibanding jalan Provinsi.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Persentase Jalan Mantap Dengan standar Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (2020)		DEVIASI
		PROVINSI (%)	NASIONAL (%)	
1.	Persentase jalan mantap	73,92	90,92	-17.00

3.3.2.5 Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Jalan Mantap

Berdasarkan hasil survey IRMS yang telah dilakukan, ditemukan bahwa persentase kemantapan jalan provinsi pada Tahun 2020 sebesar 73,92% lebih rendah dari target awal tahun 2020 yaitu 74 % dengan persentase capaian 99,89 %. Demikian juga dengan jumlah ruas jalan yang terkoneksi jalan mantap dari target tahun 2020 sebesar 38 ruas, terealisasi sebanyak 44 ruas dengan persentase capaian 115.79%. Keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai target dalam Indikator Kinerja Utama ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengalokasian sejumlah anggaran untuk program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Pada Tahun 2020, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan memiliki pagu dana perubahan sebesar Rp **42.673.814.816,00** atau sebesar 12,38 % dari total APBD-P (Belanja Langsung) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada tahun 2020 panjang jalan yang dibangun adalah **3,644 km**.
Sedangkan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mendapat porsi sebesar Rp. **126.046.032.140,00** atau sebesar 36,58% dari total APBD-P (Belanja Langsung) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada tahun 2020 panjang jalan yang dipelihara adalah **1241,99 km**.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki komitmen dalam mewujudkan infrastruktur jalan dan jembatan dengan kualitas terbaik. Hal ini

didukung dengan keberadaan UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan yang telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi sejak tanggal 15 Maret 2012.

3. Unit Layanan Gangguan yang siap 24 jam untuk mengatasi bencana alam serupa banjir/longsor yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota.
4. Dibentuknya UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI yang berkantor di wilayah kerjanya masing-masing sehingga kondisi jalan yang dipelihara semakin lebih baik.
5. Adanya pengawasan dan kontrol langsung dari pimpinan.

Dalam pencapaian target Kinerja Pemerintah Provinsi yaitu *"Jumlah ruas jalan antar daerah yang terkoneksi jalan mantap"*, Dinas PUPR berhasil dengan persentase capaian 115,79%. Akan tetapi dalam pencapaian target Kinerja Dinas PUPR sendiri yaitu *"Persentase Kemantapan Jalan Provinsi"*, tahun 2020 nilainya lebih rendah dari target yang ditetapkan. Faktor penghambat antara lain :

1. Keterbatasan alokasi anggaran pada "Program Pembangunan Jalan dan Jembatan" dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk penanganan kondisi pandemi Covid 19 yang melanda hampir semua belahan dunia, salah satunya Indonesia.
2. Keterbatasan jumlah peralatan (alat berat) untuk mendukung pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
3. Kondisi alam yang sangat mempengaruhi karna perbukitan dan jurang.
4. Overload (beban berlebih) dari kendaraan.

Kondisi kemantapan jalan akan memberikan pengaruh pada :

- 1) Meningkatnya kecepatan kendaraan sehingga mempengaruhi waktu tempuh rata-rata (waktu perjalanan) menjadi lebih singkat.
- 2) Menurunnya nilai biaya transportasi untuk pengguna jalan, yaitu nilai Biaya Operasi Kendaraan (BOK).
- 3) Meningkatnya pelayanan jalan seperti kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.

Upaya untuk meningkatkan ruas jalan yang terkoneksi jalan mantap dimasa yang akan datang antara lain :

1. Tetap memperhatikan kebutuhan dana jalan diwilayah agar dicapai jalan yang tetap bisa mempertahankan umur rencana dalam kondisi mantap.
2. Mencari alternatif pengembangan terkoneksi agar ada jalur alternatif untuk mencapai daerah yang terkoneksi, apabila ada terjadi jalan terganggu (longsor dan terban).
3. Mengalokasikan dana secara konsisten agar jalan terkoneksi terjaga kondisinya.

4. Harus diadakan peralatan (alat berat) yang memadai.
5. Dibuat peraturan terkait overload (beban berlebih) kendaraan dan kerjasama dengan Dinas Perhubungan (Stakeholder terkait).

3.3.2.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/Target Indikator Kinerja sudah sangat sesuai sehingga % capaian kemantapan jalan sebesar 99,89% yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumbar Tahun 2020 dan % capaian jumlah Jumlah Ruas Jalan yang terkoneksi dengan Kondisi Jalan Mantap sebesar 115,79% yang merupakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk percepatan dan efisiensi yang dilakukan pada program pendukung pencapaian indikator ini antara lain :

1. Ketersediaan Anggaran Program Pendukung indikator ini. Program Utama ada 2 (dua) yaitu :
 - a. Program Pembangunan Jalan & Jembatan Provinsi sebesar **Rp.42.673.814.816,00.**
 - b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan & Jembatan sebesar **Rp.126.046.032.140,00.**
2. Pengembalian sisa anggaran Program Pembangunan Jalan & Jembatan Provinsi yang tidak dipakai pada perubahan sebesar Rp. 42.673.814.816,00.
3. Pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan kegiatan.

3.3.2.7 Realisasi Anggaran

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14 Program / Kegiatan Pendukung Capaian Persentase Kemantapan Jalan Provinsi

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
1.01.03.1.01.03.01.031	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	42,673,814,816.00	39,203,178,936.00	91.87
1.01.03.1.01.03.01.031.002	Pengawasan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Provinsi	1,062,000,000.00	1,032,433,252.00	97.22
1.01.03.1.01.03.01.031.003	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat	1,227,249,035.00	1,067,395,830.00	86.97
1.01.03.1.01.03.01.031.011	Peningkatan Jalan Provinsi DAK (Pendamping)	570,114,210.00	570,114,210.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.031.018	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi	550,000,000.00	370,686,230.00	67.40
1.01.03.1.01.03.01.031.019	Pendampingan Penyiapan Pembebasan Lahan Untuk Jalan Tol	5,000,000.00	-	-
1.01.03.1.01.03.01.031.020	Penyiapan Lahan Untuk Infrastruktur Bidang ke PU an	9,514,890,000.00	9,035,656,416.00	94.96
1.01.03.1.01.03.01.031.021	Updating Database Jalan Provinsi	1,262,569,380.00	425,979,700.00	33.74
1.01.03.1.01.03.01.031.022	Penyusunan Buku Dokumen Leger Jalan dan Jembatan Provinsi	116,010,750.00	115,558,700.00	99.61
1.01.03.1.01.03.01.031.023	Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum	55,000,000.00	47,084,882.00	85.61
1.01.03.1.01.03.01.031.027	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pangkalan Koto Baru-Sialang-Gelugur (P.076)	6,650,000.00	6,405,100.00	96.32
1.01.03.1.01.03.01.031.028	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino Sawahlunto (Lapangan Segitiga)(P.038)	9,155,010.00	8,747,160.00	95.55

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
1.01.03.1.01.03.01.031.029	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Sikabau - Simp. Koto Baru (P.010)	5,000,000.00	4,790,800.00	95.82
1.01.03.1.01.03.01.031.034	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Jl. Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P.084)	8,612,000.00	8,307,600.00	96.47
1.01.03.1.01.03.01.031.035	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101)	774,761,650.00	774,126,980.00	99.92
1.01.03.1.01.03.01.031.037	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sicincin - Kurai Taji (P.028)	200,000,000.00	197,699,425.00	98.85
1.01.03.1.01.03.01.031.040	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Baso - Bts. Batusangkar (Balai Selasa) (P.036)	205,000,000.00	204,709,034.00	99.86
1.01.03.1.01.03.01.031.045	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai (P.086)	18,000,000.00	17,394,990.00	96.64
1.01.03.1.01.03.01.031.046	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palembang - Palupuh (Simp. Patai) (P.081)	235,000,000.00	234,660,347.00	99.86
1.01.03.1.01.03.01.031.049	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Panti - Simpang Empat (P.031)	12,000,000.00	11,824,655.00	98.54
1.01.03.1.01.03.01.031.051	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075)	7,600,000.00	7,547,200.00	99.31
1.01.03.1.01.03.01.031.053	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Singkarak - Aripan - Tj. Balit - Padang Ganting (P.093)	4,000,000.00	3,297,200.00	82.43
1.01.03.1.01.03.01.031.054	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palupuh - Pua gadih - Koto Tinggi (P.090)	5,100,000.00	5,002,500.00	98.09
1.01.03.1.01.03.01.031.055	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3)	7,700,000.00	7,634,750.00	99.15
1.01.03.1.01.03.01.031.056	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Indera Pura - Muara Sakai (P.018)	9,666,000.00	8,661,200.00	89.60
1.01.03.1.01.03.01.031.057	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025)	3,200,000.00	3,101,380.00	96.92

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
1.01.03.1.01.03.01.031.058	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Duku - Sicincin (P.087)	15,500,000,000.00	15,437,411,616.00	99.60
1.01.03.1.01.03.01.031.062	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104)	13,650,000.00	13,650,000.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.031.063	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rawang - Talawi (P.102)	192,800,000.00	192,032,720.00	99.60
1.01.03.1.01.03.01.031.064	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tj. Ampalu - Sijunjung (P.008)	14,000,000.00	13,704,800.00	97.89
1.01.03.1.01.03.01.031.065	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao (P.082)	217,497,000.00	217,044,112.00	99.79
1.01.03.1.01.03.01.031.066	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1)	4,425,000.00	4,215,700.00	95.27
1.01.03.1.01.03.01.031.070	Pembangunan Jembatan Lolong (P.099)	4,390,101,950.00	3,931,072,950.00	89.54
1.01.03.1.01.03.01.031.074	Perencanaan Pembangunan Jembatan Provinsi	445,000,000.00	435,208,681.00	97.80
1.01.03.1.01.03.01.031.075	Perencanaan Pembangunan Jalan Provinsi	750,000,000.00	737,724,289.00	98.36
1.01.03.1.01.03.01.031.077	Pembangunan Jembatan Kuranji Kota Padang	4,306,071,000.00	3,126,147,826.00	72.60
1.01.03.1.01.03.01.031.079	Pembangunan Jembatan Batu Bala (P.086)	220,000,000.00	211,113,724.00	95.96
1.01.03.1.01.03.01.031.081	Perencanaan Teknis Pekerjaan Mendesak dan Bencana Alam	100,000,000.00	83,569,009.00	83.57
1.01.03.1.01.03.01.031.082	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Junction - Simp. Koto Baru (P.054)	5,500,000.00	5,191,900.00	94.40
1.01.03.1.01.03.01.031.083	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang) (P.035)	204,000,000.00	201,831,400.00	98.94
1.01.03.1.01.03.01.031.085	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Simpang Kota Mambang - Balingka (P.078)	200,000,000.00	191,696,997.00	95.85
1.01.03.1.01.03.01.031.087	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang	6,500,000.00	5,996,450.00	92.25

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
	Padang Karambia - Tanjung Bungo (P.085)			
1.01.03.1.01.03.01.031.090	Pembangunan Jembatan Pigogah (P.097)	6,051,150.00	6,051,150.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.031.091	Pembangunan Jembatan Sikali (P.084)	4,538,874.00	4,441,224.00	97.85
1.01.03.1.01.03.01.031.095	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai (P.044)	7,000,000.00	6,176,500.00	88.24
1.01.03.1.01.03.01.031.101	Pembangunan Jembatan Tiku (P.072)	3,828,746.00	3,828,746.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.031.102	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang DAK (P.073)	4,238,110.00	2,658,110.00	62.72
1.01.03.1.01.03.01.031.105	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Teluk Bayur - Nipah - Purus DAK (P.098)	1,178,000.00	1,165,000.00	98.90
1.01.03.1.01.03.01.031.112	Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi (P.069.2)	3,156,951.00	3,050,851.00	96.64
1.01.03.1.01.03.01.032	PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	126,046,032,140.00	117,589,121,163.00	93.29
1.01.03.1.01.03.01.032.012	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Propinsi Dan Bangunan Pelengkap Jalan	13,000,000.00	8,507,600.00	65.44
1.01.03.1.01.03.01.032.015	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rao - Rokan (Bts.Riau) (P.095)	825,000,000.00	824,996,675.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.016	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Talu - Lubuk - Sikaping (P.096)	540,000,000.00	539,999,690.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.017	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	1,410,000,000.00	1,409,997,229.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.018	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Sawah - Kumpulan (P.068)	1,095,000,000.00	1,094,997,485.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.019	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Panti - Simpang Empat	2,220,000,000.00	2,219,998,326.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.020	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang IV - Sasak	500,000,000.00	499,987,140.00	100.00

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
1.01.03.1.01.03.01.032.021	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Air Balam - Air Bangis	378,000,000.00	377,998,735.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.022	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bungo Tanjung - Teluk Tapang - Bts. Sumut	39,000,000.00	38,936,900.00	99.84
1.01.03.1.01.03.01.032.023	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025)	2,082,900,000.00	2,082,888,600.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.024	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Koto Mambang - Balingka (P.078)	985,000,000.00	984,972,450.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.025	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Baso - Piladang (P.079)	418,800,000.00	418,780,001.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.026	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Matur - Palembang (P.080)	396,000,000.00	395,990,580.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.027	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palembang - Palupuh (Sp.Patai) (P.081)	159,000,000.00	158,998,250.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.028	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palupuh - Puagaduh - Koto Tinggi (P.090)	390,000,000.00	389,983,900.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.029	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Koto Gadang - Palembang (P.088)	705,000,000.00	704,996,000.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.030	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi (P.069.2)	1,075,500,000.00	1,075,477,340.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.031	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pangkalan - Koto Baru - Sialang - Gelugur (P.076)	1,740,000,000.00	1,739,925,389.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.032	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo (P.085)	52,500,000.00	52,462,600.00	99.93
1.01.03.1.01.03.01.032.033	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Jln Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P.084)	425,100,000.00	425,076,645.00	99.99
1.01.03.1.01.03.01.032.034	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kubu Kerambil - Batusangkar (P.035)	479,400,000.00	479,377,280.00	100.00

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
1.01.03.1.01.03.01.032.035	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Baso - Batusangkar (P.036)	863,700,000.00	863,678,529.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.036	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batusangkar - Guguk Cino (P.037)	312,000,000.00	311,970,640.00	99.99
1.01.03.1.01.03.01.032.037	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Sitangkai (P.039)	453,600,000.00	453,589,380.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.038	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batas Kota Payakumbuh - Sitangkai (P.044)	1,265,250,000.00	1,265,240,840.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.039	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau (P.072)	927,000,000.00	926,994,850.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.040	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sicincin - Kurai Taji	493,200,000.00	493,194,650.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.041	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Duku (Ketaping) - Pariaman	615,000,000.00	614,985,350.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.042	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Teluk Bayur - Nipah - Purus (P.098)	293,000,000.00	292,920,150.00	99.97
1.01.03.1.01.03.01.032.043	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Batas Sawahlunto (Lap.Segitiga) (P.038)	918,000,000.00	917,960,829.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.044	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batusangkar - Ombilin (P.070)	655,300,000.00	655,293,800.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.045	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Singkarak - Arian - Tj.Balit - Pdg Ganting	900,000,000.00	899,977,200.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.046	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pintu Angin - Lubuk Saiyo (P.094)	165,000,000.00	164,961,800.00	99.98
1.01.03.1.01.03.01.032.047	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp Ganting Payo - Batas Solok - Sumani (P.092)	852,000,000.00	851,575,650.00	99.95
1.01.03.1.01.03.01.032.048	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rawang - Talawi(P.102)	180,000,000.00	179,904,900.00	99.95

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
1.01.03.1.01.03.01.032.049	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1)	600,000,000.00	599,986,950.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.050	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Malako - Abai Sangir (P.056.2)	510,000,000.00	509,917,150.00	99.98
1.01.03.1.01.03.01.032.051	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Solok - Alahan Panjang (P.071)	1,164,000,000.00	1,163,887,750.00	99.99
1.01.03.1.01.03.01.032.052	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao (P.082)	511,500,000.00	511,030,900.00	99.91
1.01.03.1.01.03.01.032.053	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Abai Sangir - Sungai Dareh (P.056.3)	1,300,000,000.00	1,299,845,050.00	99.99
1.01.03.1.01.03.01.032.054	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simancung - Tj. Ampalu (P.007)	332,400,000.00	332,396,000.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.055	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bts.Sitangkai - Tj. Ampalu (P.040)	432,000,000.00	431,967,878.00	99.99
1.01.03.1.01.03.01.032.056	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sijunjung - Tn. Badantung (P.055)	132,000,000.00	131,998,050.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.057	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tj.Ampalu - Sijunjung (P.008)	600,000,000.00	599,830,475.00	99.97
1.01.03.1.01.03.01.032.058	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Sikabau - Sp. Koto Baru (P.010)	870,000,000.00	869,995,915.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.059	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Koto Baru - Tj. Simalidu (P.011)	357,000,000.00	357,000,000.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.060	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Koto Baru - Junction (P.012)	162,000,000.00	161,995,100.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.061	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Junction - Abai Siat (P.054)	315,000,000.00	314,995,600.00	100.00

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
1.01.03.1.01.03.01.032.062	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Napar - Bukit Bual - Tj.Ampalu (P.091)	150,000,000.00	149,990,600.00	99.99
1.01.03.1.01.03.01.032.063	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)	545,869,263.00	545,846,100.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.064	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai (P.086)	630,000,000.00	629,902,430.00	99.98
1.01.03.1.01.03.01.032.065	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan (P.100)	13,480,700.00	13,480,700.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.067	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Inderapura - Muara Sakai (P.018)	219,000,000.00	218,938,100.00	99.97
1.01.03.1.01.03.01.032.068	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. SP II - Kantor Camat	153,000,000.00	152,996,800.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.032.069	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kantor Camat - Berkat	30,000,000.00	29,996,300.00	99.99
1.01.03.1.01.03.01.032.074	Penanganan Kritis dan Unit Layanan Gangguan Jalan dan Jembatan Provinsi (ULG)	1,400,000,000.00	1,307,736,475.00	93.41
1.01.03.1.01.03.01.032.077	Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan Untuk Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	843,000,000.00	842,506,377.00	99.94
1.01.03.1.01.03.01.032.078	Pengadaan Peralatan dan Bahan Jalan dan Jembatan Untuk Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	3,927,448,400.00	3,923,532,100.00	99.90
1.01.03.1.01.03.01.032.079	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DAK	18,220,000,000.00	14,742,323,200.00	80.91
1.01.03.1.01.03.01.032.089	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Baso - Piladang (P.079) DAK	3,220,000,000.00	3,009,560,900.00	93.46
1.01.03.1.01.03.01.032.090	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao (P.082) DAK	4,720,000,000.00	3,804,610,451.00	80.61
1.01.03.1.01.03.01.032.093	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) DAK	4,720,000,000.00	4,428,924,188.00	93.83

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
1.01.03.1.01.03.01.032.095	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau (P.072) DAK	6,670,000,000.00	5,552,179,692.00	83.24
1.01.03.1.01.03.01.032.096	Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	125,000,000.00	124,277,050.00	99.42
1.01.03.1.01.03.01.032.097	Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	125,000,000.00	120,544,370.00	96.44
1.01.03.1.01.03.01.032.098	Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	125,000,000.00	122,097,200.00	97.68
1.01.03.1.01.03.01.032.099	Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	125,000,000.00	123,397,040.00	98.72
1.01.03.1.01.03.01.032.100	Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	125,000,000.00	120,144,835.00	96.12
1.01.03.1.01.03.01.032.101	Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	125,000,000.00	122,135,451.00	97.71
1.01.03.1.01.03.01.032.102	Rehab/Pemel Jembatan Siti Nurbaya (P.098)	200,000,000.00	196,826,000.00	98.41
1.01.03.1.01.03.01.032.104	Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Provinsi di Ruas Jalan Duku - Sicincin (P.087)	9,000,000.00	8,712,500.00	96.81
1.01.03.1.01.03.01.032.105	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di KSPN Mandeh (PHJD)	47,517,083,777.00	45,197,018,103.00	95.12

Sumber data : LRA Desember 2020 Dinas PUPR

3.3.3 Capaian Kinerja Indikator Persentase Cakupan Air Minum

Cakupan air minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *Universal Access* Nasional. Pada Tahun 2020 ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menargetkan capaian sebesar 80% untuk cakupan air minum Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Data persentase cakupan layanan air minum provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 diperoleh dari Bidang Cipta Karya berupa “*Rekapitulasi Analisa Data Cakupan Akses Penyediaan Layanan Air Minum dan Daerah Rawan Air Per kab/kota di Sumatera Barat sampai tahun 2020*” yang bersumber dari data PDAM Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat dan Pamsimas diketahui capaian persentase cakupan air minum pada Tahun 2020 adalah sebesar 80,04%, lebih besar dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 yaitu 80%. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

$$\% \text{ cakupan air minum} = \frac{\text{jumlah penduduk akses aman (jiwa)}}{\text{total jumlah penduduk (jiwa)}} \times 100\%$$

$$\% \text{ cakupan air minum} = \frac{4050219}{5060063} \times 100\%$$

$$\% \text{ cakupan air minum} = 80,04 \%$$

Untuk mencapai target pemenuhan cakupan air minum, pada prinsipnya merupakan program/kegiatan yang terdapat di kabupaten/kota. Data capaian air minum provinsi Sumatera Barat bersumber dari rekap data PDAM, non PDAM dan Pamsimas yang ada di kabupaten/kota . Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat hanya menangani SPAM Regional.

Tabel 3.15 Target dan Capaian Indikator Persentase Cakupan Air Minum di Sumatera Barat Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Cakupan Air Minum	Persentase cakupan air minum	80%	80,04%

Sumber data : Bidang Cipta Karya (Rekapitulasi Data Cakupan Air Minum) per kab/kota

Tabel 3.16 Rekapitulasi Data Cakupan Akses Penyediaan Layanan Air Minum dan Daerah Rawan Air Per Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat sampai tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	AKSES PENYEDIAAN AIR MINUM						AKSES AMAN		AKSES TIDAK AMAN		DAERAH RAWAN AIR
			JARINGAN PERPIPAAN			NON PERPIPAAN							
			PDAM		NON PDAM		(SGL+PMA+PAH)		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)	NAGARI/ KEL
			(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)					
	SUMBAR	5,060,063	1,971,770	38.97	569,392	11.25	1,509,058	29.82	4,050,220	80.04	1,009,843	19.96	139
1	Kab. Agam	466,978	148,855	31.88	60,152	12.88	174,837	37.44	383,844	82.20	83,134	17.80	5
2	Kab. Dharmasraya	209,123	2,504	1.20	16,201	7.75	128,818	61.60	147,523	70.54	61,600	29.46	7
3	Kab. Kepulauan Mentawai	82,751	4,849	5.86	7,788	9.41	10,958	13.24	23,595	28.51	59,156	71.49	30
4	Kab. Lima Puluh Kota	364,598	59,726	16.38	56,483	15.49	150,988	41.41	267,197	73.29	97,401	26.71	16
5	Kab. Padang Pariaman	380,830	111,135	29.18	26,396	6.93	171,116	44.93	308,646	81.05	72,184	18.95	6
6	Kab. Pasaman	263,838	154,451	58.54	38,341	14.53	28,069	10.64	220,861	83.71	42,977	16.29	4
7	Kab. Pasaman Barat	392,781	101,744	25.90	58,844	14.98	176,675	44.98	337,263	85.87	55,518	14.13	5
8	Kab. Pesisir Selatan	442,824	134,643	30.41	27,557	6.22	209,133	47.23	371,332	83.86	71,492	16.14	13

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	AKSES PENYEDIAAN AIR MINUM						AKSES AMAN		AKSES TIDAK AMAN		DAERAH RAWAN AIR
			JARINGAN PERPIPAAN			NON PERPIPAAN							
			PDAM		NON PDAM		(SGL+PMA+PAH)		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)	NAGARI/ KEL
			(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)					
9	Kab. Sijunjung	214,529	71,494	33.33	39,819	18.56	68,665	32.01	179,979	83.89	34,550	16.11	9
10	Kab. Solok	358,382	113,466	31.66	119,994	33.48	44,973	12.55	278,433	77.69	79,949	22.31	13
11	Kab. Solok Selatan	153,942	31,883	20.71	41,328	26.85	52,442	34.07	125,653	81.62	28,289	18.38	8
12	Kab. Tanah Datar	342,864	115,094	33.57	16,405	4.78	139,191	40.60	270,691	78.95	72,173	21.05	4
13	Kota Bukittinggi	118,260	70,541	59.65	505	0.43	24,203	20.47	95,249	80.54	23,011	19.46	8
14	Kota Padang	879,442	624,714	71.04	37,135	4.22	18,860	2.14	680,709	77.40	198,733	22.60	3
15	Kota Padang Panjang	48,792	33,736	69.14	-	-	10,559	21.64	44,295	90.78	4,498	9.22	-
16	Kota Pariaman	82,629	8,370	10.13	9,555	11.56	57,588	69.69	75,513	91.39	7,116	8.61	6
17	Kota Payakumbuh	124,057	102,709	82.79	9,228	7.44	11,024	8.89	122,961	99.12	1,096	0.88	-
18	Kota Sawah Lunto	68,626	30,468	44.40	2,948	4.30	23,437	34.15	56,852	82.84	11,774	17.16	2

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	AKSES PENYEDIAAN AIR MINUM						AKSES AMAN		AKSES TIDAK AMAN		DAERAH RAWAN AIR
			JARINGAN PERPIPAAN			NON PERPIPAAN							
			PDAM		NON PDAM		(SGL+PMA+PAH)		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)	NAGARI/ KEL
			(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)	(Jiwa)	(%)					
19	Kota Solok	64,817	51,389	79.28	713	1.10	7,522	11.61	59,624	91.99	5,193	8.01	-

Sumber data : PDAM Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat dan Pamsimas

3.3.3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Untuk persentase cakupan air minum, (%) capaian adalah perbandingan antara target dan realisasi yang secara matematis ditulis sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{80,04}{80,00} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 100,05 \%$$

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Indikator Persentase Cakupan Air Minum di Sumatera Barat

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Cakupan Air Minum	Persentase cakupan air minum	80%	80,04 %	100.05%

Dengan pencapaian atas target sebesar 100,05% tersebut maka klasifikasi penilaian untuk persentase Cakupan Air Minum di Sumatera Barat adalah **Sangat Baik**.

3.3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi kinerja dan capaian Persentase layanan air minum pada tahun 2018, 2019 & 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian Cakupan Layanan Air Minum tahun 2018, 2019 & 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Persentase cakupan air minum	75	80	80	76,04	78,65	80,04	101,39	98,31	100,05

Sumber data : LAKIP 2018, 2019

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi persentase (%) cakupan layanan air minum dari tahun 2018, 2019 dan 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Demikian juga halnya persentase (%) capaian pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

3.3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun 2020 terhadap Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi 2020}}{\text{Target 2021}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{80,04}{86,00} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 93,07 \%$$

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2020 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2020	TARGET 2021	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Cakupan Air Minum	Persentase cakupan air minum	80,04%	86 %	93,07%

Dari tabel diketahui bahwa capaian air minum s/d tahun 2020 adalah 93,07 dari target periode akhir Renstra.

3.3.3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi capaian cakupan layanan air minum Provinsi jika dibandingkan dengan standar nasional ditampilkan pada tabel dibawah.

Tabel 3.20 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Persentase Cakupan Air Minum	Realisasi Provinsi Sumatera Barat	Standar Nasional
2016	72.32%	71.50%
2017	75.83%	72.04%
2018	76,04%	78%
2019	78,65%	78%
2020	80,04%	-
Target 2021	86%	85%

Sumber : RPJMN 2015-2020 (diolah) dan Randal (APBN)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bidang Cipta Karya, setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Kementerian-Ditjen Cipta Karya diketahui bahwa nilai Persentase Cakupan Air Minum Nasional tahun 2020 masih dalam proses pengumpulan data dan belum tuntas.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Persentase cakupan air minum Nasional tahun 2020 belum diketahui nilainya sementara cakupan air minum Provinsi berada pada posisi 80,04 %.

3.3.3.5 Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Cakupan Air Minum

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang bersumber dari PDAM dan Pamsimas, ditemukan bahwa “PersentaseCakupan Layanan Air Minum” provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 sebesar 80,04%. Nilai tersebut lebih tinggi dari target tahun 2020

yaitu 80%. Hal ini dikarenakan kegiatan yang mendukung yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah dilaksanakan secara baik, rata-rata mencapai target 100%.

Disamping itu dukungan dari kabupaten/kota yang menjadi basis pelayanan pada tahun 2020 cukup baik, hanya ada 6 kab/kota yang nilai cakupan layanan air minum <80% (target yang ditetapkan).

Dalam pelaksanaan tentunya juga ada beberapa kendala yang dapat menjadi faktor penghambat, antara lain :

1. Belum optimalnya anggaran yg tersedia di kab/kota,
2. Keterbatasan ketersediaan sumber air baku di kabupaten/kota.
3. Di beberapa kab/kota masih terkendala pembebasan lahan.
4. Masih banyak nya desa yang tidak dapat terjangkau oleh pelayanan PDAM.

Upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan cakupan air minum dimasa yang akan datang antara lain :

1. Sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi dalam cakupan layanan air minum, maka pemerintah provinsi mendorong pemerintah kab/kota dalam meningkatkan maupun pengembangan dalam pelayanan air minum untuk masyarakat yang belum terlayani.
2. Sesuai dengan kewenangan provinsi bahwa untuk pelayanan air minum yang berskala regional, sehingga pemerintah provinsi mencoba mendorong kabupaten/kota yang mempunyai keterbatasan sumber air baku untuk melakukan MoU dalam pengelolaan air minum regional yang nantinya dapat melayani ketersediaan air curah untuk kabupaten/kota.

3.3.3.6 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/target indikator kinerja cakupan air minum yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah sangat sesuai. Dalam hal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumbar lebih banyak berperan dalam hal pelayanan Cakupan Air Minum yang bersifat regional. Pada prinsipnya instansi terkait yang ada di kabupaten/kota yang memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan air minum di daerah.

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Untuk percepatan dan efisiensi yang dilakukan pada program pendukung pencapaian indikator ini antara lain :

1. Ketersediaan Anggaran Program Pendukung indikator ini, yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Spam Lintas Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 258.245.400,-
2. Pengembalian sisa anggaran kegiatan yang tidak dipakai pada perubahan yaitu sebesar Rp. 391.754.600.
3. Pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan kegiatan.

3.3.3.7 Realisasi Anggaran

Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.21 Program/Kegiatan Pendukung Capaian Cakupan Air Minum

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
1.01.03.1.01.03.01.037	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	258,245,400.00	255,371,010.00	98.89
1.01.03.1.01.03.01.037.010	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciaptakarya di Provinsi Sumatera Barat	185,000,000.00	184,863,710.00	99.93
1.01.03.1.01.03.01.037.011	Pembinaan Kegiatan PAMSIMAS di Provinsi Sumatera Barat	42,372,400.00	42,254,750.00	99.72
1.01.03.1.01.03.01.037.012	Workshop Dan Pelatihan Air Minum Provinsi Sumatera Barat	873,000.00	873,000.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.037.021	Pembangunan SPAM Kws Singgalang - Kota Pd. Panjang, Kab.Tanah Datar	30,000,000.00	27,379,550.00	91.27

3.3.4 Capaian Kinerja Indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

Dasar penetapan target (kolom 4) mengacu pada penetapan target semenjak penyusunan dokumen RPJMD 2016-2021, dengan mengacu pada baseline capaian tahun sebelumnya. Sama halnya dengan air minum, cakupan sanitasi merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target Universal Access Nasional. Pada Tahun 2020 ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menargetkan capaian sebesar 79% untuk cakupan sanitasi Provinsi Sumatera Barat.

3.3.4.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ cakupan sanitasi} = \frac{\text{jumlah \% akses sanitasi 19 kab/kota}}{19} \times 100\%$$

$$\% \text{ cakupan sanitasi} = 81,68 \%$$

Sebagaimana air minum, sanitasi juga merupakan salah satu indikator yang termuat dalam *Universal Access*. Pada Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat menargetkan capaian Persentase Rumah Tangga Bersanitasi sebesar 79 % dengan realisasi capaian sebesar 81,68%.

Tabel 3.22 Target dan Capaian Indikator Persentase Rumah Tangga Bersanitasi di Sumatera Barat Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI (%)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Cakupan Sanitasi	Persentase Cakupan Sanitasi	79%	81,68%	103.39%

Sumber data : Bidang Cipta Karya (Laporan Kemajuan Akses Jamban Provinsi Sumatera Barat)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat capaian persentase Rumah tangga bersanitasi pada Tahun 2020 adalah sebesar 81,68%. Nilai ini melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 yaitu 79%. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Cipta Karya diketahui bahwa untuk mencapai target pemenuhan rumah tangga bersanitasi dilihat dari akses jamban yang datanya diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.23 Laporan Kemajuan Akses Jamban Provinsi Sumatera Barat s/d Desember 2020

No	Nama Kabupaten	Identitas Data (Jumlah data/keseluruhan*)			Kemajuan								
		Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	Jumlah KK	JSP	% Akses JSP	JSSP	% Akses JSSP	Sharing	% Akses Sharing	BABS	% Akses BABS	% Akses PRogres
1	KOTA PAYAKUMBUH	5/5	48/48	32242/24056	30693	95.55	294	1.03	1255	3.42	0	0	100.00
2	KOTA SOLOK	2/2	13/13	18704/14565	17154	92.73	465	2.64	1085	4.63	0	0	100.00
3	KOTA PADANG PANJANG	2/2	16/16	12031/11754	10706	85.41	18	0.15	1307	14.44	0	0	100.00
4	SIJUNJUNG	8/8	62/62	56304/54831	36491	59.58	12320	24.89	7493	15.53	0	0	100.00
5	KOTA BUKITTINGGI	3/3	24/24	26057/26779	20540	77.46	3841	15.54	695	3.39	981	3.61	96.39
6	KOTA PADANG	11/11	104/104	207877/197561	178870	82.69	8430	5.49	9384	4.9	11193	6.93	93.07
7	KOTA PARIAMAN	4/4	71/71	19919/19418	13145	67.21	3805	17.44	1062	5.83	1907	9.52	90.48
8	KOTA SAWAH LUNTO	4/4	37/37	16442/15353	13185	81.35	1085	6.11	465	2.46	1707	10.07	89.93
9	DHARMASRAYA	11/11	52/52	51355/50276	42644	78.95	3009	6.07	1951	3.86	3751	11.13	88.87
10	PESISIR SELATAN	15/15	182/182	119388/110125	84495	66.96	13418	12.04	9098	9.27	12377	11.74	88.26
11	AGAM	16/16	82/82	111253/118665	50556	47.92	35969	27.71	7758	7.83	16970	16.54	83.46
12	TANAH DATAR	14/14	75/75	102664/92201	65867	68.05	6523	4.94	4735	4.93	25539	22.09	77.91
13	PASAMAN BARAT	11/11	19/19	97978/92235	60856	59.53	9645	10.15	4125	5.13	23352	25.19	74.81
14	SOLOK	14/14	74/74	88756/94553	40077	44.86	13011	16.33	7423	9.63	28245	29.18	70.82
15	LIMA PULUH KOTA	13/13	79/79	93472/94966	49381	53.43	10958	12.77	237	0.36	32896	33.43	66.57
16	SOLOK SELATAN	7/7	39/39	42715/40298	22740	57.22	2385	6.46	919	1.88	16671	34.44	65.56
17	PADANG PARIAMAN	17/17	60/60	80320/98788	43658	53.31	70	0.09	5968	7.66	30624	38.95	61.05
18	PASAMAN	12/12	37/37	67758/66373	31509	46.85	743	0.99	4518	8	30988	44.16	55.84
19	KEPULAUAN MENTAWAI	10/10	43/43	20992/18866	3259	16.75	4179	19.92	2184	10.19	11370	53.14	46.86
	SUMATERA BARAT	179/179	1117/1117	1266227/1241663	815826	63.54	130168	11.41	71662	6.73	248571	18.32	81.68

Sumber : Dinkes Provinsi Sumatera Barat

3.3.4.2 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian dengan Tahun Lalu

Realisasi kinerja dan capaian Persentase Cakupan Sanitasi pada tahun 2018, 2019 & 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.24 Realisasi Kinerja & Capaian Persentase Sanitasi tahun 2018, 2019 & 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Persentase cakupan sanitasi	75	78	79	75,19	79,78	81,68	100,25	102,28	103,39

Dari tabel di atas diketahui bahwa realisasi persentase (%) Cakupan Layanan sanitasi dari tahun 2018, 2019 dan 2020 mencapai target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

3.3.4.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun 2020 terhadap Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi 2020}}{\text{Target 2021}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{81,68}{80,00} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 102,10 \%$$

Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2020 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2020	TARGET s/d 2021	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Cakupan Sanitasi	Persentase Cakupan Sanitasi	81,68 %	80 %	102,10%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian rumah tangga bersanitasi sebesar 102,10 % dari target Akhir Periode Renstra (tahun 2021).

3.3.4.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan Standar Nasional

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bidang Cipta Karya, setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Kementerian-Ditjen Cipta Karya diketahui bahwa nilai Persentase Cakupan Sanitasi tahun 2020 masih dalam proses pengumpulan data dan belum tuntas.

Perbandingan realisasi capaian cakupan layanan sanitasi Provinsi jika dibandingkan dengan standar nasional ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.26 Perbandingan antara Realisasi dengan Standar Nasional (dalam kurun RPJMN 2015-2020)

Persentase Sanitasi	Realisasi Provinsi Sumatera Barat	Standar Nasional
2017	75.88%	71.44%
2018	75,19 %	74,74 %
2019	79,78%	75,00%
2020	81,68%	-
Target 2021	80%	85%

Sumber : RPJMN 2015-2020 (diolah)

3.3.4.5 *Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Rumah Tangga Bersanitasi*

Berdasarkan hasil rekapitulasi data yang bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, diketahui bahwa persentase cakupan layanan sanitasi provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 sebesar 81,68%. Nilai tersebut lebih tinggi dari target tahun 2020 yaitu 79 %. Keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai target dalam Indikator Kinerja Utama ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengalokasian sejumlah anggaran untuk Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi sebesar Rp607,476,140.00 dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar 1,229,704,200.00.
2. Adanya pengawasan dan kontrol langsung dari pimpinan.

Dalam pelaksanaan tentunya juga ada beberapa kendala yang dapat menjadi faktor penghambat, antara lain :

1. Belum optimalnya anggaran yg tersedia di kabupaten/kota,
2. Di beberapa kab/kota masih terkendala pembebasan lahan.

3.3.4.6 *Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Rumah Tangga Bersanitasi*

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/target indikator kinerja cakupan sanitasi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah sangat sesuai. Dalam hal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumbar lebih banyak berperan dalam hal pelayanan Cakupan Sanitasi yang bersifat regional. Pada

prinsipnya instansi terkait yang ada di kabupaten/kota yang memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan sanitasi di daerah.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/Target Indikator Kinerja cakupan sanitasi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah sangat sesuai. Rincian efisiensi sesuai indikator sasaran :

- Pengembalian sisa anggaran kegiatan yang tidak dipakai pada perubahan yaitu : Program Pengelolaan Sistem Drainase sebesar Rp. 5.277.523.860,00.
- Pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan kegiatan.

3.3.4.7 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja untuk persentase cakupan layanan sanitasi yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.27 Program/Kegiatan Pendukung Capaian Cakupan Sanitasi

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	
			Keuangan (Rp)	Keuangan (%)
1.01.03.1.01.03.01.033	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1,229,704,200.00	1,201,776,580.00	97.73
1.01.03.1.01.03.01.033.009	Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)	39,183,600.00	38,892,150.00	99.26
1.01.03.1.01.03.01.033.010	Pendampingan Program Sanimas IDB	65,964,200.00	64,583,730.00	97.91
1.01.03.1.01.03.01.033.011	Pembangunan TPA Sampah Regional Payakumbuh	1,122,000,000.00	1,095,744,400.00	97.66
1.01.03.1.01.03.01.033.012	Study Kelayakan TPA Sampah Regional Kota Padang, Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman	2,556,400.00	2,556,300.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.038	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE KEWENANGAN PROVINSI	607,476,140.00	595,642,205.00	98.05
1.01.03.1.01.03.01.038.003	Pembangunan Drainase Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	5,796,500.00	5,796,500.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.038.006	Pembangunan Drainase Kota Padang	115,000,000.00	107,096,400.00	93.13
1.01.03.1.01.03.01.038.007	Pembangunan Drainase Primer / Lintas Kab/Kota Kab. Tanah Datar	250,000,000.00	247,990,250.00	99.20
1.01.03.1.01.03.01.038.008	Pembangunan Drainase Primer Kab Padang Pariaman	2,117,650.00	2,117,650.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.038.009	Drainase Primer Kota Bukittinggi - Kab. Agam	14,561,990.00	14,561,940.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.038.010	Drainase Primer di Pasar Lubuk Basung	110,000,000.00	108,468,315.00	98.61
1.01.03.1.01.03.01.038.011	Drainase Primer Lunang - Batang Agam	110,000,000.00	109,611,150.00	99.65

3.3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

3.3.5.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Untuk persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang, (%) capaian adalah perbandingan antara target dan realisasi yang secara matematis ditulis sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{84}{84} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 100,00 \%$$

Tabel 3.28 Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya RTR yang berkekuatan hukum	Jumlah RTR yang diperdakan	-		
2	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR	Jumlah program yang sesuai dengan rencana tata ruang	25	21	84%

Adapun tingkat kesesuaian program dimaksud, dapat kami jabarkan sebagai berikut :

1. Program pemantapan fungsi kota PKN yang dimaksud dalam RTRW adalah dalam rangka perwujudan pengembangan pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat yakni untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya. Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki PKN adalah salah satunya pelabuhan laut internasional. Hal ini telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut pada Dinas Perhubungan selaku OPD penanggung jawab.
2. Program pemantapan fungsi kota PKW, sama halnya dengan PKN, maka untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Sumatera Barat, sarana prasarana minimum yang harus dimiliki salah satunya yaitu peningkatan kapasitas pelayanan air minum. Hal ini telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
3. Program pengembangan dan penataan PKN, Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki PKN adalah salah satunya terminal regional tipe A. Hal ini telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui

- program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
4. Program Pengembangan PKW dan PKWp, untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) di Provinsi Sumatera Barat, sarana prasarana minimum yang harus dimiliki salah satunya peningkatan pelayanan rumah sakit dan telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD pada Dinas Kesehatan selaku OPD penanggung jawab.
 5. Program Pengembangan PKL, untuk Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) sarana prasarana minimum yang harus dimiliki tidak jauh berbeda dengan PKW yakni salah satunya peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan telah diakomodir dalam program pembangunan (RPJM) melalui program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
 6. Program Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi pada RTRW untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur transportasi guna mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
 7. Program Perwujudan Sistem Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi dalam RTRW untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air dalam rangka ketahanan pangan serta meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air selaku OPD penanggung jawab.
 8. Program Prasarana Perumahan dan Permukiman pada RTRW adalah rehabilitasi dan peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Limbah dan telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
 9. Program Pengembangan Kawasan Hutan dalam RTRW berupa pengembangan hutan tanaman, pengembangan ekowisata. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Perencanaan dan Pengembangan Hutan pada Dinas Kehutanan selaku OPD penanggung jawab.

10. Program Pemantapan Kawasan Lindung dalam RTRW salah satunya berupa rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam pada Dinas Kehutanan.
11. Program Kawasan Rawan Bencana Alam dalam RTRW salah satunya berupa upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan pada BPBD.
12. Program pengembangan kawasan permukiman perkotaan dalam RTRW berupa percepatan penyediaan perumahan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
13. Program Pengembangan Kawasan Pertanian pada RTRW berupa perluasan lahan dan peningkatan produktifitas lahan padi sawah. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Pertanian pada Dinas Pertanian.
14. Program Pengembangan Perkebunan pada RTRW berupa pengembangan kawasan tanaman tahunan/perkebunan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Perkebunan pada Dinas Perkebunan.
15. Program Pengembangan Kawasan Peternakan pada RTRW berupa pengembangan kawasan agribisnis peternakan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Peternakan pada Dinas Peternakan.
16. Program Pengembangan Perikanan dan Kelautan pada RTRW salah satunya berupa rehabilitasi dan konservasi sumberdaya pesisir dan laut. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
17. Program Pengembangan Kawasan Pertambangan dalam RTRW salah satunya berupa inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas ESDM.
18. Program Pengembangan Industri dalam RTRW salah satunya berupa program pengembangan industri untuk kabupaten dan kota. Hal ini telah sesuai dengan

program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

19. Program Pengembangan Pariwisata dalam RTRW yaitu pengembangan kepariwisataan pada kawasan unggulan wisata maupun kawasan potensial wisata. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata pada Dinas Pariwisata.
20. Program Penyusunan RTR Kawasan Strategis merupakan program perwujudan kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Perencanaan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
21. Program Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Strategis, merupakan program perwujudan kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 3.29 Capaian Kinerja Indikator kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)	REALISASI (%)	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	84	84	100,00%

Dengan pencapaian target sebesar 100,00%, maka klasifikasi penilaian untuk persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang adalah **Sangat Baik**.

3.3.5.2 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian dengan Tahun Lalu

Perbandingan Realisasi kinerja dan capaian kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang pada tahun 2018, 2019 & 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja & Capaian kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang tahun 2018, 2019 & 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan	82	83	84	84	84	84	102,44	101,20	100,00

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA (%)			REALISASI (%)			% CAPAIAN		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	Program RTRW Provinsi									

Sumber data : LAKIP 2018,2019

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang dari tahun 2018 s/d 2020 berada pada nilai yang sama yaitu 84%. Pada prinsipnya realisasi masih melebihi target, akan tetapi persentase capaian menurun dari tahun sebelumnya.

3.3.5.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d tahun 2020 terhadap Renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2020 dengan target jangka menengah (target akhir periode renstra) yang tertuang dalam dokumen Renstra dapat dihitung dengan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi 2020}}{\text{Target 2021}} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = \frac{84}{86} \times 100$$

$$\% \text{ capaian} = 97.67\%$$

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d 2020 Terhadap Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI s/d 2020	TARGET s/d 2021	% CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	84%	86%	97.67%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang sebesar 97.67 % dari target Akhir Periode Renstra (tahun 2021).

3.3.5.4 Penyebab Keberhasilan Peningkatan Kinerja Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

Dengan tercapainya target kesesuaian program antara rencana pembangunan, dalam hal ini kami mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRW), dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan telah disusun dengan baik sesuai dengan arahan dari Bappenas yakni

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan dokumen rencana tata ruang, sehingga terdapat sinkronisasi program diantara kedua dokumen perencanaan.

Adapun fungsi rencana tata ruang adalah sebagai kerangka pembangunan, dimana program pembangunan harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

Disamping itu, dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen rencana tata ruang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari pihak perangkat daerah (OPD) selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif.

3.3.5.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Program/Kegiatan Penunjang)

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran/Target Indikator Kinerja kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat sudah sangat sesuai. Rincian efisiensi sesuai indikator sasaran :

- Pengembalian sisa anggaran kegiatan yang tidak dipakai pada perubahan yaitu pada program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang sebesar Rp. 125.000.000,00 dari pagu awal.
- Pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan kegiatan.

3.3.5.6 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai Target Indikator Kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan, pastinya membutuhkan program dan kegiatan yang mendukung. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja untuk persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.32 Program/Kegiatan Pendukung Capaian Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
			Rp	%
1.01.03.1.01.03.01.036	PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	1,168,826,750.00	1,098,221,030.00	93.96
1.01.03.1.01.03.01.036.006	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Penataan Ruang	3,208,650.00	3,202,000.00	99.79
1.01.03.1.01.03.01.036.011	Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Metropolitan PASOPALAPA	250,000,000.00	248,822,599.00	99.53
1.01.03.1.01.03.01.036.012	Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mandeh Kab. Pesisir Selatan	75,000,000.00	66,053,783.00	88.07
1.01.03.1.01.03.01.036.013	Penyusunan Database ke PU an dan Tata Ruang Provinsi / Kabupaten / Kota (lanjutan)	2,268,100.00	2,268,100.00	100.00
1.01.03.1.01.03.01.036.014	Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	125,000,000.00	123,786,500.00	99.03
1.01.03.1.01.03.01.036.016	Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan Terhadap Penataan Ruang	60,000,000.00	49,999,971.00	83.33
1.01.03.1.01.03.01.036.017	Koordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota (TKPRD) Provinsi Sumatera Barat	157,350,000.00	153,127,801.00	97.32
1.01.03.1.01.03.01.036.019	One Map One Policy Provinsi Sumatera Barat	370,000,000.00	349,546,000.00	94.47
1.01.03.1.01.03.01.036.020	Percepatan Penyelesaian Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat	120,000,000.00	95,877,676.00	79.90
1.01.03.1.01.03.01.036.021	Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Silaping Kabupaten Pasaman Barat	6,000,000.00	5,536,600.00	92.28
1.01.03.1.01.03.01.039	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	175,000,000.00	169,023,318.00	96.58
1.01.03.1.01.03.01.039.003	Monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten / Kota	75,000,000.00	73,768,492.00	98.36
1.01.03.1.01.03.01.039.005	Identifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat	100,000,000.00	95,254,826.00	95.25

Tabel 3.33 Penilaian Kinerja Program/Kegiatan Dinas PUPR Tahun 2020

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI KEUANGAN %	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
1	2	3	4	4	5	6	7
	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	747,375,000.00	74.40			
	4.1.2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	747,375,000.00				
	4.1.2.15	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	747,375,000.00				
	4.1.2.15.02	Laboratorium	227,375,000.00				
	4.1.2.15.05	Alat-Alat Berat	520,000,000.00				
	5	BELANJA DAERAH	374,876,197,065.00	94.78			
	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	30,302,707,432.00	97.82			
	5.2	BELANJA LANGSUNG	344,573,489,633.00	94.51			
	1.01.1.01.03.01.001	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	4,845,652,183.00	96.48	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
1	1.01.1.01.03.01.001.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000.00	96.51	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
2	1.01.1.01.03.01.001.002	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	1,636,500,000.00	95.10	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
3	1.01.1.01.03.01.001.008	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	2,243,413,783.00	99.73	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
4	1.01.1.01.03.01.001.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	175,994,200.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
5	1.01.1.01.03.01.001.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150,000,000.00	91.57	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
6	1.01.1.01.03.01.001.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	30,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
7	1.01.1.01.03.01.001.015	Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Per-UU	34,500,000.00	98.32	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
8	1.01.1.01.03.01.001.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Luar Daerah	438,672,200.00	91.88	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
9	1.01.1.01.03.01.001.019	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	57,000,000.00	87.77	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI KEUANGAN %	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
1	2	3	4	4	5	6	7
10	1.01.1.01.03.01.001.020	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	72,072,000.00	61.20	Cukup	100.00	Sangat Baik
	1.01.1.01.03.01.002	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3,174,552,520.00	96.07	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
11	1.01.1.01.03.01.002.003	Pembangunan Gedung Kantor	274,000,000.00	97.28	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
12	1.01.1.01.03.01.002.011	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	353,150,000.00	88.37	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
13	1.01.1.01.03.01.002.015	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	587,215,420.00	88.94	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
14	1.01.1.01.03.01.002.017	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	531,400,000.00	99.31	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
15	1.01.1.01.03.01.002.019	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor	47,276,950.00	99.99	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
16	1.01.1.01.03.01.002.025	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas/Mess	249,040,000.00	99.57	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
17	1.01.1.01.03.01.002.026	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	798,970,150.00	99.73	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
18	1.01.1.01.03.01.002.040	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	333,500,000.00	98.72	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
	1.01.1.01.03.01.003	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	-	Batal	-	Batal
<i>batal</i>	1.01.1.01.03.01.003.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	Batal	-	Batal
	1.01.1.01.03.01.005	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	92,280,800.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
19	1.01.1.01.03.01.005.003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	92,280,800.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
	1.01.1.01.03.01.006	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1,509,643,000.00	96.89	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
20	1.01.1.01.03.01.006.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73,747,400.00	86.98	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
21	1.01.1.01.03.01.006.004	Penatausahaan Keuangan SKPD	829,100,000.00	99.94	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI KEUANGAN %	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
1	2	3	4	4	5	6	7
22	1.01.1.01.03.01.006.006	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	186,467,000.00	90.65	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
23	1.01.1.01.03.01.006.007	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD	160,260,000.00	90.10	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
24	1.01.1.01.03.01.006.008	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	260,068,600.00	98.61	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
	1.01.03.1.01.03.01.023	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	1,092,718,300.00	99.45	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
25	1.01.03.1.01.03.01.023.001	Pemeliharaan Alat - Alat Ukur Laboratorium Ke Binamargaan	123,500,000.00	97.09	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
26	1.01.03.1.01.03.01.023.002	Kegiatan Pengadaan Alat - Alat Ukur Dan Laboratorium Ke Binamargaan	649,218,300.00	99.98	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik Sangat Baik
27	1.01.03.1.01.03.01.023.003	Monitoring Pengendalian Mutu UPTD	320,000,000.00	99.29	Sangat Baik	100.00	
	1.01.03.1.01.03.01.031	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	42,673,814,816.00	91.87	Sangat Baik	99.52	Sangat Baik
28	1.01.03.1.01.03.01.031.002	Pengawasan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Provinsi	1,062,000,000.00	97.22	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
29	1.01.03.1.01.03.01.031.003	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan Dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat	1,227,249,035.00	86.97	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
30	1.01.03.1.01.03.01.031.011	Peningkatan Jalan Provinsi DAK (Pendamping)	570,114,210.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
31	1.01.03.1.01.03.01.031.018	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi	550,000,000.00	67.40	Cukup	100.00	Sangat Baik
32	1.01.03.1.01.03.01.031.019	Pendampingan Penyiapan Pembebasan Lahan Untuk Jalan Tol	5,000,000.00	-	Batal	100.00	Sangat Baik
33	1.01.03.1.01.03.01.031.020	Penyiapan Lahan Untuk Infrastruktur Bidang ke PU an	9,514,890,000.00	94.96	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
34	1.01.03.1.01.03.01.031.021	Updating Database Jalan Provinsi	1,262,569,380.00	33.74	Kurang	100.00	Sangat Baik
35	1.01.03.1.01.03.01.031.022	Penyusunan Buku Dokumen Leger Jalan dan Jembatan Provinsi	116,010,750.00	99.61	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI KEUANGAN %	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
1	2	3	4	4	5	6	7
36	1.01.03.1.01.03.01.031.023	Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum	55,000,000.00	85.61	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
37	1.01.03.1.01.03.01.031.027	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pangkalan Koto Baru-Sialang-Gelugur (P.076)	6,650,000.00	96.32	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
38	1.01.03.1.01.03.01.031.028	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino Sawahlunto (Lapangan Segitiga)(P.038)	9,155,010.00	95.55	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
39	1.01.03.1.01.03.01.031.029	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Sikabau - Simp. Koto Baru (P.010)	5,000,000.00	95.82	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
40	1.01.03.1.01.03.01.031.034	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Jl. Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P.084)	8,612,000.00	96.47	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
41	1.01.03.1.01.03.01.031.035	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur (P.101)	774,761,650.00	99.92	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
42	1.01.03.1.01.03.01.031.037	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sicincin - Kurai Taji (P.028)	200,000,000.00	98.85	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
43	1.01.03.1.01.03.01.031.040	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Baso - Bts. Batusangkar (Balai Selasa) (P.036)	205,000,000.00	99.86	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
44	1.01.03.1.01.03.01.031.045	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai (P.086)	18,000,000.00	96.64	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
45	1.01.03.1.01.03.01.031.046	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palembang - Palupuh (Simp. Patai) (P.081)	235,000,000.00	99.86	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
46	1.01.03.1.01.03.01.031.049	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Panti - Simpang Empat (P.031)	12,000,000.00	98.54	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
47	1.01.03.1.01.03.01.031.051	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075)	7,600,000.00	99.31	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
48	1.01.03.1.01.03.01.031.053	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Singkarak - Aripan - Tj. Balit - Padang Ganting (P.093)	4,000,000.00	82.43	Baik	100.00	Sangat Baik

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI KEUANGAN %	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
1	2	3	4	4	5	6	7
49	1.01.03.1.01.03.01.031.054	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palupuh - Pua gadih - Koto Tinggi (P.090)	5,100,000.00	98.09	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
50	1.01.03.1.01.03.01.031.055	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Abai Sangir - Sei. Dareh (P.056.3)	7,700,000.00	99.15	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
51	1.01.03.1.01.03.01.031.056	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Indera Pura - Muara Sakai (P.018)	9,666,000.00	89.60	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
52	1.01.03.1.01.03.01.031.057	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025)	3,200,000.00	96.92	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
53	1.01.03.1.01.03.01.031.058	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Duku - Sicincin (P.087)	15,500,000,000.00	99.60	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
54	1.01.03.1.01.03.01.031.061	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batusangkar - Ombilin (P.070)	200,000,000.00	99.69	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
55	1.01.03.1.01.03.01.031.062	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kantor Camat - Berkat (P.104)	13,650,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
56	1.01.03.1.01.03.01.031.063	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rawang - Talawi (P.102)	192,800,000.00	99.60	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
57	1.01.03.1.01.03.01.031.064	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tj. Ampalu - Sijunjung (P.008)	14,000,000.00	97.89	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
58	1.01.03.1.01.03.01.031.065	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao (P.082)	217,497,000.00	99.79	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
59	1.01.03.1.01.03.01.031.066	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1)	4,425,000.00	95.27	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
60	1.01.03.1.01.03.01.031.070	Pembangunan Jembatan Lolong (P.099)	4,390,101,950.00	89.54	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
61	1.01.03.1.01.03.01.031.074	Perencanaan Pembangunan Jembatan Provinsi	445,000,000.00	97.80	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
62	1.01.03.1.01.03.01.031.075	Perencanaan Pembangunan Jalan Provinsi	750,000,000.00	98.36	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
63	1.01.03.1.01.03.01.031.077	Pembangunan Jembatan Kuranji Kota Padang	4,306,071,000.00	72.60	Cukup	76.39	Baik
64	1.01.03.1.01.03.01.031.079	Pembangunan Jembatan Batu Bala (P.086)	220,000,000.00	95.96	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI KEUANGAN %	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
1	2	3	4	4	5	6	7
65	1.01.03.1.01.03.01.031.081	Perencanaan Teknis Pekerjaan Mendesak dan Bencana Alam	100,000,000.00	83.57	Baik	100.00	Sangat Baik
66	1.01.03.1.01.03.01.031.082	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Junction - Simp. Koto Baru (P.054)	5,500,000.00	94.40	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
67	1.01.03.1.01.03.01.031.083	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kubu Kerambil - Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang) (P.035)	204,000,000.00	98.94	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
68	1.01.03.1.01.03.01.031.085	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Simpang Kota Mambang - Balingka (P.078)	200,000,000.00	95.85	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
69	1.01.03.1.01.03.01.031.087	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Padang Karambia - Tanjung Bungo (P.085)	6,500,000.00	92.25	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
70	1.01.03.1.01.03.01.031.090	Pembangunan Jembatan Pigogah (P.097)	6,051,150.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
71	1.01.03.1.01.03.01.031.091	Pembangunan Jembatan Sikali (P.084)	4,538,874.00	97.85	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
72	1.01.03.1.01.03.01.031.095	Pembangunan/Peningkatan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bts. Kota Payakumbuh - Sitangkai (P.044)	7,000,000.00	88.24	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
73	1.01.03.1.01.03.01.031.101	Pembangunan Jembatan Tiku (P.072)	3,828,746.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
74	1.01.03.1.01.03.01.031.102	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang DAK (P.073)	4,238,110.00	62.72	Cukup	100.00	Sangat Baik
75	1.01.03.1.01.03.01.031.105	Pembangunan Jalan Provinsi di Ruas Jalan Teluk Bayur - Nipah - Purus DAK (P.098)	1,178,000.00	98.90	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
76	1.01.03.1.01.03.01.031.112	Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi (P.069.2)	3,156,951.00	96.64	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
	1.01.03.1.01.03.01.032	PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	126,046,032,140.00	93.29	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
77	1.01.03.1.01.03.01.032.012	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Propinsi Dan Bangunan Pelengkap Jalan	13,000,000.00	65.44	Cukup	100.00	Sangat Baik

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI KEUANGAN %	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
1	2	3	4	4	5	6	7
78	1.01.03.1.01.03.01.032.015	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rao - Rokan (Bts.Riau) (P.095)	825,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
79	1.01.03.1.01.03.01.032.016	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Talu - Lubuk - Sikaping (P.096)	540,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
80	1.01.03.1.01.03.01.032.017	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	1,410,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
81	1.01.03.1.01.03.01.032.018	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Sawah - Kumpulan (P.068)	1,095,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
82	1.01.03.1.01.03.01.032.019	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Panti - Simpang Empat	2,220,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
83	1.01.03.1.01.03.01.032.020	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang IV - Sasak	500,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
84	1.01.03.1.01.03.01.032.021	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Air Balam - Air Bangis	378,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
85	1.01.03.1.01.03.01.032.022	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bungo Tanjung - Teluk Tapang - Bts. Sumut	39,000,000.00	99.84	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
86	1.01.03.1.01.03.01.032.023	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025)	2,082,900,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
87	1.01.03.1.01.03.01.032.024	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Koto Mambang - Balingka (P.078)	985,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
88	1.01.03.1.01.03.01.032.025	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Baso - Piladang (P.079)	418,800,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
89	1.01.03.1.01.03.01.032.026	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Matur - Palembang (P.080)	396,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
90	1.01.03.1.01.03.01.032.027	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palembang - Palupuh (Sp.Patai) (P.081)	159,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
91	1.01.03.1.01.03.01.032.028	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Palupuh - Puagaduh - Koto Tinggi (P.090)	390,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI KEUANGAN %	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
1	2	3	4	4	5	6	7
92	1.01.03.1.01.03.01.032.029	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Padang Koto Gadang - Palembang (P.088)	705,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
93	1.01.03.1.01.03.01.032.030	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi (P.069.2)	1,075,500,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
94	1.01.03.1.01.03.01.032.031	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pangkalan - Koto Baru - Sialang - Gelugur (P.076)	1,740,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
95	1.01.03.1.01.03.01.032.032	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo (P.085)	52,500,000.00	99.93	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
96	1.01.03.1.01.03.01.032.033	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Jln Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P.084)	425,100,000.00	99.99	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
97	1.01.03.1.01.03.01.032.034	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kubu Kerambil - Batusangkar (P.035)	479,400,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
98	1.01.03.1.01.03.01.032.035	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Baso - Batusangkar (P.036)	863,700,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
99	1.01.03.1.01.03.01.032.036	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batusangkar - Guguk Cino (P.037)	312,000,000.00	99.99	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
100	1.01.03.1.01.03.01.032.037	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Sitangkai (P.039)	453,600,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
101	1.01.03.1.01.03.01.032.038	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batas Kota Payakumbuh - Sitangkai (P.044)	1,265,250,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
102	1.01.03.1.01.03.01.032.039	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau (P.072)	927,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
103	1.01.03.1.01.03.01.032.040	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sicincin - Kurai Taji	493,200,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
104	1.01.03.1.01.03.01.032.041	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Duku (Ketaping) - Pariaman	615,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
105	1.01.03.1.01.03.01.032.042	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Teluk Bayur - Nipah - Purus (P.098)	293,000,000.00	99.97	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI KEUANGAN %	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
1	2	3	4	4	5	6	7
106	1.01.03.1.01.03.01.032.043	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Guguk Cino - Batas Sawahlunto (Lap.Segitiga) (P.038)	918,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
107	1.01.03.1.01.03.01.032.044	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batusangkar - Ombilin (P.070)	655,300,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
108	1.01.03.1.01.03.01.032.045	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Singkarak - Arian - Tj.Balit - Pdg Ganting	900,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
109	1.01.03.1.01.03.01.032.046	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pintu Angin - Lubuk Saiyo (P.094)	165,000,000.00	99.98	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
110	1.01.03.1.01.03.01.032.047	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp Ganting Payo - Batas Solok - Sumani (P.092)	852,000,000.00	99.95	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
111	1.01.03.1.01.03.01.032.048	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Rawang - Talawi(P.102)	180,000,000.00	99.95	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
112	1.01.03.1.01.03.01.032.049	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simpang Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1)	600,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
113	1.01.03.1.01.03.01.032.050	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Lubuk Malako - Abai Sangir (P.056.2)	510,000,000.00	99.98	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
114	1.01.03.1.01.03.01.032.051	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Solok - Alahan Panjang (P.071)	1,164,000,000.00	99.99	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
115	1.01.03.1.01.03.01.032.052	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao (P.082)	511,500,000.00	99.91	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
116	1.01.03.1.01.03.01.032.053	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Abai Sangir - Sungai Dareh (P.056.3)	1,300,000,000.00	99.99	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
117	1.01.03.1.01.03.01.032.054	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simancung - Tj. Ampalu (P.007)	332,400,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
118	1.01.03.1.01.03.01.032.055	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Bts.Sitangkai - Tj. Ampalu (P.040)	432,000,000.00	99.99	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI KEUANGAN %	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
1	2	3	4	4	5	6	7
119	1.01.03.1.01.03.01.032.056	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sijunjung - Tn. Badantung (P.055)	132,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
120	1.01.03.1.01.03.01.032.057	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Tj.Ampalu - Sijunjung (P.008)	600,000,000.00	99.97	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
121	1.01.03.1.01.03.01.032.058	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Sikabau - Sp. Koto Baru (P.010)	870,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
122	1.01.03.1.01.03.01.032.059	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Koto Baru - Tj. Simalidu (P.011)	357,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
123	1.01.03.1.01.03.01.032.060	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Koto Baru - Junction (P.012)	162,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
124	1.01.03.1.01.03.01.032.061	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Junction - Abai Siat (P.054)	315,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
125	1.01.03.1.01.03.01.032.062	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Sp.Napar - Bukit Bual - Tj.Ampalu (P.091)	150,000,000.00	99.99	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
126	1.01.03.1.01.03.01.032.063	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073)	545,869,263.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
127	1.01.03.1.01.03.01.032.064	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Surantih - Kayu Aro - Langgai (P.086)	630,000,000.00	99.98	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
128	1.01.03.1.01.03.01.032.065	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan (P.100)	13,480,700.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
129	1.01.03.1.01.03.01.032.067	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Inderapura - Muara Sakai (P.018)	219,000,000.00	99.97	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
130	1.01.03.1.01.03.01.032.068	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Simp. SP II - Kantor Camat	153,000,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
131	1.01.03.1.01.03.01.032.069	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Ruas Jalan Kantor Camat - Berkat	30,000,000.00	99.99	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
132	1.01.03.1.01.03.01.032.074	Penanganan Kritis dan Unit Layanan Gangguan Jalan dan Jembatan Provinsi (ULG)	1,400,000,000.00	93.41	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI KEUANGAN %	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
1	2	3	4	4	5	6	7
133	1.01.03.1.01.03.01.032.077	Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan Untuk Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	843,000,000.00	99.94	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
134	1.01.03.1.01.03.01.032.078	Pengadaan Peralatan dan Bahan Jalan dan Jembatan Untuk Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	3,927,448,400.00	99.90	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
135	1.01.03.1.01.03.01.032.079	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025) DAK	18,220,000,000.00	80.91	Baik	100.00	Sangat Baik
136	1.01.03.1.01.03.01.032.089	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Baso - Piladang (P.079) DAK	3,220,000,000.00	93.46	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
137	1.01.03.1.01.03.01.032.090	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao (P.082) DAK	4,720,000,000.00	80.61	Baik	100.00	Sangat Baik
138	1.01.03.1.01.03.01.032.093	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) DAK	4,720,000,000.00	93.83	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
139	1.01.03.1.01.03.01.032.095	Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Lubuk Basung - Sungai Limau (P.072) DAK	6,670,000,000.00	83.24	Baik	100.00	Sangat Baik
140	1.01.03.1.01.03.01.032.096	Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I	125,000,000.00	99.42	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
141	1.01.03.1.01.03.01.032.097	Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II	125,000,000.00	96.44	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
142	1.01.03.1.01.03.01.032.098	Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III	125,000,000.00	97.68	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
143	1.01.03.1.01.03.01.032.099	Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV	125,000,000.00	98.72	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
144	1.01.03.1.01.03.01.032.100	Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V	125,000,000.00	96.12	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
145	1.01.03.1.01.03.01.032.101	Pengendalian UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI	125,000,000.00	97.71	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
146	1.01.03.1.01.03.01.032.102	Rehab/Pemel Jembatan Siti Nurbaya (P.098)	200,000,000.00	98.41	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
batal	1.01.03.1.01.03.01.032.103	Rehab/Pemel Jembatan Jembatan Sunur (P.075)	-	-	Batal	-	Batal
147	1.01.03.1.01.03.01.032.104	Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Ruas Jalan Provinsi di Ruas Jalan Duku - Sicincin (P.087)	9,000,000.00	96.81	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
148	1.01.03.1.01.03.01.032.105	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di KSPN Mandeh (PHJD)	47,517,083,777.00	95.12	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI KEUANGAN %	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
1	2	3	4	4	5	6	7
	1.01.03.1.01.03.01.033	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1,229,704,200.00	97.73	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
149	1.01.03.1.01.03.01.033.009	Pendampingan Sanitasi Permukiman (PPSP)	39,183,600.00	99.26	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
150	1.01.03.1.01.03.01.033.010	Pendampingan Program Sanimas IDB	65,964,200.00	97.91	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
151	1.01.03.1.01.03.01.033.011	Pembangunan TPA Sampah Regional Payakumbuh	1,122,000,000.00	97.66	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
152	1.01.03.1.01.03.01.033.012	Study Kelayakan TPA Sampah Regional Kota Padang, Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman	2,556,400.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
	1.01.03.1.01.03.01.034	PROGRAM PENYELENGGARAAN PBL DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	160,829,254,184.00	96.07	Sangat Baik	99.97	Sangat Baik
153	1.01.03.1.01.03.01.034.001	Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat (Lanjutan)	145,682,115,634.00	95.82	Sangat Baik	99.56	Sangat Baik
154	1.01.03.1.01.03.01.034.002	Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat (Lanjutan)	2,221,500.00	95.75	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
155	1.01.03.1.01.03.01.034.006	Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Linggarjati	120,000,000.00	56.74	Cukup	100.00	Sangat Baik
156	1.01.03.1.01.03.01.034.008	Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat	165,000,000.00	99.73	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
157	1.01.03.1.01.03.01.034.011	Pembangunan Taman Wisata Kelok Sembilan	16,741,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
158	1.01.03.1.01.03.01.034.016	Pembangunan Guest House Gubernur	5,000,000,000.00	99.86	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
159	1.01.03.1.01.03.01.034.021	Pendampingan Pembinaan Pengelolaan Rumah Negara di Sumatera Barat	50,000,000.00	99.05	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
160	1.01.03.1.01.03.01.034.022	Lokarkarya, Sosialisasi, Forum Komunikasi dan Informasi Bangunan Gedung	198,494,950.00	98.85	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
161	1.01.03.1.01.03.01.034.024	Pembinaan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG)	477,175,050.00	98.11	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
162	1.01.03.1.01.03.01.034.025	Assesmen Bangunan Gedung dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	176,426,050.00	97.14	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI KEUANGAN %	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
1	2	3	4	4	5	6	7
163	1.01.03.1.01.03.01.034.027	Pembangunan Gedung Samsat Kota Padang	1,906,724,200.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
164	1.01.03.1.01.03.01.034.037	Sistem Informasi Tenaga Terampil Berbasis Elektronik	37,402,600.00	71.80	Cukup	100.00	Sangat Baik
165	1.01.03.1.01.03.01.034.038	Dukungan Pelaksanaan MTQ Nasional	6,996,953,200.00	97.95	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
	1.01.03.1.01.03.01.035	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	526,000,000.00	63.57	Cukup	100.00	Sangat Baik
166	1.01.03.1.01.03.01.035.017	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sumatera Barat	76,000,000.00	77.16	Baik	100.00	Sangat Baik
167	1.01.03.1.01.03.01.035.020	Bimbingan Teknis/Workshop Jasa Konstruksi	100,000,000.00	97.48	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
168	1.01.03.1.01.03.01.035.021	Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi	100,000,000.00	81.96	Baik	100.00	Sangat Baik
169	1.01.03.1.01.03.01.035.023	Sertifikasi Ahli Muda	250,000,000.00	38.51	Kurang	100.00	Sangat Baik
	1.01.03.1.01.03.01.036	PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	1,168,826,750.00	93.96	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
170	1.01.03.1.01.03.01.036.006	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Penataan Ruang	3,208,650.00	99.79	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
171	1.01.03.1.01.03.01.036.011	Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Metropolitan PASOPALAPA	250,000,000.00	99.53	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
172	1.01.03.1.01.03.01.036.012	Legalisasi RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mandeh Kab. Pesisir Selatan	75,000,000.00	88.07	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
173	1.01.03.1.01.03.01.036.013	Penyusunan Database ke PU an dan Tata Ruang Provinsi / Kabupaten / Kota (lanjutan)	2,268,100.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
174	1.01.03.1.01.03.01.036.014	Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	125,000,000.00	99.03	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
175	1.01.03.1.01.03.01.036.016	Peningkatan Pemahaman Pemangku Kepentingan Terhadap Penataan Ruang	60,000,000.00	83.33	Baik	100.00	Sangat Baik

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI KEUANGAN %	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
1	2	3	4	4	5	6	7
176	1.01.03.1.01.03.01.036.017	Koordinasi Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kab/Kota (TKPRD) Provinsi Sumatera Barat	157,350,000.00	97.32	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
177	1.01.03.1.01.03.01.036.019	One Map One Policy Provinsi Sumatera Barat	370,000,000.00	94.47	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
178	1.01.03.1.01.03.01.036.020	Percepatan Penyelesaian Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat	120,000,000.00	79.90	Baik	100.00	Sangat Baik
179	1.01.03.1.01.03.01.036.021	Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Silaping Kabupaten Pasaman Barat	6,000,000.00	92.28	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
	1.01.03.1.01.03.01.037	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	258,245,400.00	98.89	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
180	1.01.03.1.01.03.01.037.010	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciptakarya di Provinsi Sumatera Barat	185,000,000.00	99.93	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
181	1.01.03.1.01.03.01.037.011	Pembinaan Kegiatan PAMSIMAS di Provinsi Sumatera Barat	42,372,400.00	99.72	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
182	1.01.03.1.01.03.01.037.012	Workshop Dan Pelatihan Air Minum Provinsi Sumatera Barat	873,000.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
183	1.01.03.1.01.03.01.037.021	Pembangunan SPAM Kws Singgalang - Kota Pd. Panjang, Kab.Tanah Datar	30,000,000.00	91.27	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
	1.01.03.1.01.03.01.038	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE KEWENANGAN PROVINSI	607,476,140.00	98.05	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
184	1.01.03.1.01.03.01.038.003	Pembangunan Drainase Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	5,796,500.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
185	1.01.03.1.01.03.01.038.006	Pembangunan Drainase Kota Padang	115,000,000.00	93.13	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
186	1.01.03.1.01.03.01.038.007	Pembangunan Drainase Primer / Lintas Kab/Kota Kab. Tanah Datar	250,000,000.00	99.20	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
187	1.01.03.1.01.03.01.038.008	Pembangunan Drainase Primer Kab Padang	2,117,650.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik

NO	KODE REKENING	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN Rp	REALISASI KEUANGAN %	KINERJA	REALISASI FISIK %	KINERJA
1	2	3	4	4	5	6	7
		Pariaman					
188	1.01.03.1.01.03.01.038.009	Drainase Primer Kota Bukittinggi - Kab. Agam	14,561,990.00	100.00	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
189	1.01.03.1.01.03.01.038.010	Drainase Primer di Pasar Lubuk Basung	110,000,000.00	98.61	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
190	1.01.03.1.01.03.01.038.011	Drainase Primer Lunang - Batang Agam	110,000,000.00	99.65	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
	1.01.03.1.01.03.01.039	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	175,000,000.00	96.58	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
191	1.01.03.1.01.03.01.039.003	Monitoring Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten / Kota	75,000,000.00	98.36	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
192	1.01.03.1.01.03.01.039.005	Identifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat	100,000,000.00	95.25	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
	1.01.03.1.01.03.01.019	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH	344,289,200.00	98.42	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
193	1.01.03.1.01.03.01.019.008	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi (UPT Balai Pengujian Konstruksi)	186,012,000.00	97.17	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik
194	1.01.03.1.01.03.01.019.009	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi (UPT Workshop dan Peralatan)	158,277,200.00	99.90	Sangat Baik	100.00	Sangat Baik

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan cerminan capaian target kinerja dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis pada tahun selanjutnya. Laporan Kinerja disusun berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan terhadap Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan 16 (enam belas) program, meliputi: 11 (sebelas) program utama dan 5 (lima) program pendukung. Pada masing-masing program terdiri dari beberapa kegiatan.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan berdasarkan realisasi fisik maupun keuangannya. Pada laporan ini, dilakukan pengukuran capaian kinerja secara kuantitatif dan dilanjutkan dengan analisis penilaian kinerja secara kuantitatif dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria skala kualitatif sehingga dapat diketahui kinerja program/kegiatan secara kualitatif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada LAKIP ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Total penyerapan anggaran Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2020 ini adalah sebesar 94,51 % (Rp. 325.661.322.371,-) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 344.573.489.633,-. Realisasi fisik sebesar 99,36%.
2. Dari 16 (enam belas) program yang ada pada tahun 2020, dari capaian kinerja fisik diketahui bahwa ke 16 (enam belas) program terlaksana dengan kinerja sangat baik. Sementara capaian kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat terhadap 16 (enam belas) program diketahui bahwa terdapat 14 (empat belas) program berkinerja sangat baik, 1 (satu) program berkinerja cukup dan 1 (satu) program batal.

Penilaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 ini menjadi salah satu bahan untuk pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi sesuai Penetapan Kinerja yang ada. Kendala-kendala yang dihadapi pada tahun 2020 dapat dijadikan cermin untuk antisipasi pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan capaian keuangan diketahui bahwa kinerja Dinas PUPR berada pada prediket penilaian “**baik**”, sementara dari capaian realisasi fisik berada pada predikat “**sangat baik**”. Adapun upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka mewujudkan capaian keuangan lebih baik di masa mendatang antara lain :

1. Mempersiapkan kelengkapan administrasi untuk persiapan Pengadaan Barang dan Jasa untuk semua paket pekerjaan terutama paket lelang agar pelaksanaan pekerjaan fisik bisa dilakukan lebih awal, sehingga tidak ada lagi paket pekerjaan yang dilaksanakan melewati Tahun Anggaran yang nantinya akan berefek pada rendahnya serapan keuangan seperti yang terjadi pada tahun 2020 ini.
2. Menempatkan SDM yang berkualitas sesuai dengan kompetensi bidangnya masing-masing sehingga kinerja pelaksanaan kegiatan memberikan hasil yang baik.
3. Meningkatkan monitoring dan pengawasan berlapis dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.